



**ANALISIS SUB SEKTOR PERIKANAN TANGKAP DI KECAMATAN  
MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI  
(PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)**

**SKRIPSI**

Oleh

**DARWIN EKA INDRIYANA  
NIM 130810101100**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**



**ANALISIS SUB SEKTOR PERIKANAN TANGKAP DI KECAMATAN  
MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI  
(PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)**

**SKRIPSI**

Oleh

**DARWIN EKA INDRIYANA  
NIM 130810101100**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**



**ANALISIS SUB SEKTOR PERIKANAN TANGKAP DI KECAMATAN  
MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI  
(PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

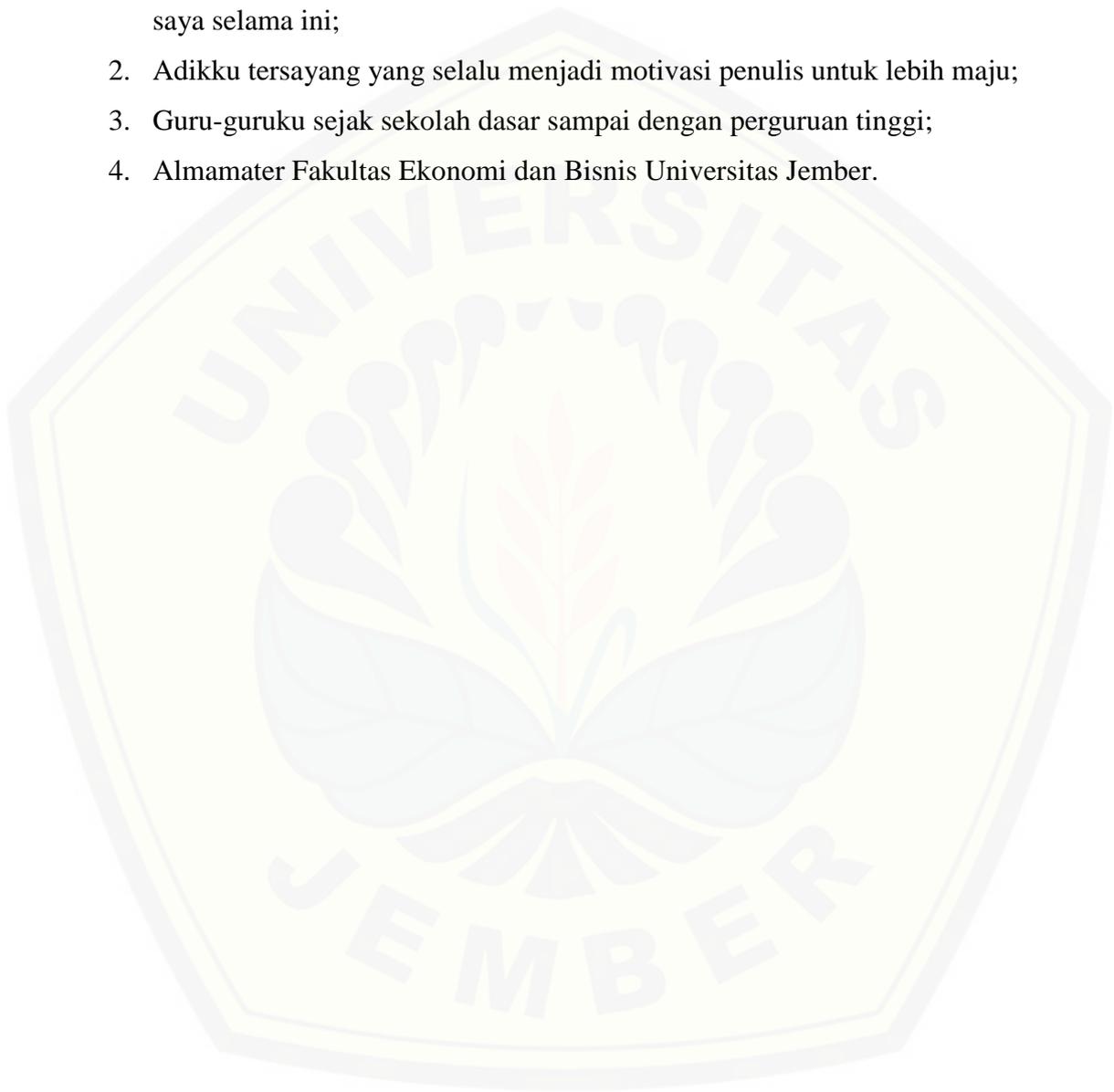
**DARWIN EKA INDRIYANA  
NIM 130810101100**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta, yang telah mendukung dan selalu mendoakan saya selama ini;
2. Adikku tersayang yang selalu menjadi motivasi penulis untuk lebih maju;
3. Guru-guruku sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



### MOTTO

“Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu”

(Imam Syafi’i)

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”

(Aristoteles)

“Bukan spesies yang paling kuat atau paling cerdas yang akan bertahan, tetapi mereka yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman”

(Charles Darwin)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Darwin Eka Indriyana

NIM : 130810101100

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Subsektor Perikanan Tangkap di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi (Perspektif Pembangunan Berkelanjutan)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Juni 2017

Yang menyatakan,

Darwin Eka Indriyana

NIM 130810101100

**SKRIPSI**

**ANALISIS SUBSEKTOR PERIKANAN TANGKAP DI KECAMATAN  
MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI (PERSPEKTIF  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)**

Oleh

Darwin Eka Indriyana  
NIM 130810101100

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Agus Luthfi, M.Si.

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Subsektor Perikanan Tangkap Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi (Perspektif Pembangunan Berkelanjutan)

Nama Mahasiswa : Darwin Eka Indriyana

NIM : 1308101100

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Regional

Tanggal Persetujuan : 06 Juni 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E.,M.P

NIP. 19720713 199903 1 001

Drs. Agus Luthfi, M.Si.

NIP. 19650522 199002 1 001

Ketua Jurusan

Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes

NIP. 19641108 198902 2 001

***Analisis Subsektor Perikanan Tangkap di Kecamatan Muncar Kabupaten  
Banyuwangi (Perspektif Pembangunan Berkelanjutan)***

Darwin Eka Indriyana

*Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

**ABSTRAK**

Pembangunan sektor perikanan terutama perikanan tangkap selama ini kurang mendapatkan perhatian, hal ini terjadi karena strategi pembangunan yang berbasis sumberdaya alam lebih mengutamakan kepada sektor pertanian dan pertambangan. Pembangunan perikanan secara berkelanjutan diarahkan untuk melestarikan sumberdaya itu sendiri agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan serta sistem tata kelola perikanan tangkap dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dan metode PSS (*product-service system*) untuk menilai keberlanjutan perikanan tangkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan perikanan tangkap di Kecamatan Muncar belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Berdasarkan analisis PSS, ada beberapa alternatif rekomendasi yang dapat digunakan dalam menunjang keberlanjutan perikanan tangkap. Prioritas rekomendasi ditunjukkan sebuah diagram dalam bentuk radar keberlanjutan.

Kata Kunci : perikanan tangkap, pembangunan berkelanjutan, metode PSS (*product-service system*), kesejahteraan masyarakat nelayan.

***Subsector Analysis of Capture Fisheries in Muncar Subdistrict Banyuwangi  
Regency (Sustainable Development Perspective)***

Darwin Eka Indriyana

*Department of Economics, Economic and Business Faculty, Universitas Jember*

**ABSTRACT**

*The development of fisheries sector especially capture fisheries has been low attention, it happens because development strategic based on natural resources more prioritizes on agriculture and mining sector. Sustainable development on fisheries is directed to conserve the resources that the utilization can be done optimally to improve the welfare of fisherman. The purpose of the research to analyze the economic institutional of fisherman and fisheries management system in the concept of sustainable development. The research method used is qualitative descriptive analysis and PSS method (product-service system) to assess the sustainability of capture fisheries. The result is that the fisheries institution in Muncar subdistrict has not been able to improve the prosperity of fisherman community. Based on PSS analysis, there are several alternative recommendations that can be used to support the sustainability of capture fisheries. Priority recommendations are indicated by a diagram in the form of sustainability radar.*

*Keywords : capture fisheries, sustainable development, PSS method, welfare of fishing communities.*

## RINGKASAN

**Analisis Subsektor Perikanan Tangkap di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi (Perspektif Pembangunan Berkelanjutan);** Darwin Eka Indriyana, 130810101100; 2017: 81 halaman ; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember.

Keberlanjutan merupakan kata kunci dalam pembangunan sumberdaya perikanan. Konsep pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk mengelola sumberdaya perikanan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat nelayan yang bertumpu pada sumberdaya laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat tiga aspek yang menjadi perhatian dalam pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan dimana ketiganya harus saling terintegrasi dalam mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan dan sistem tata kelola perikanan tangkap dalam menunjang pembangunan berkelanjutan sumberdaya perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode PSS (*product-service system*) untuk menilai keberlanjutan sumberdaya perikanan. Objek dalam penelitian ini yaitu masyarakat nelayan khususnya nelayan buruh yang berasal dari Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar. Sampel diambil dengan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 98 responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk tujuan pertama belum ada lembaga atau institusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sistem ketergantungan antara masyarakat nelayan dengan juragan sudah menjadi sebuah tradisi dan juga kebutuhan. Berdasarkan tujuan yang kedua, pengelolaan lestari sumberdaya perikanan di perairan Selat Bali yang berada di Kecamatan Muncar belum berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis menggunakan SDO-Toolkit (*sustainability design orienting*). Dari setiap dimensi

(ekonomi, sosial dan lingkungan) terdapat beberapa kriteria yang memiliki hasil nilai *Medium* (M) bahkan ada yang *High* (H). Ini berarti bahwa setiap dimensi membutuhkan alternatif rekomendasi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan perikanan tangkap.



## PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Perikanan Tangkap di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi (Perspektif Pembangunan Berkelanjutan)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi akhir strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Dr. Herman Cahyo Diartha, S.E., M.P selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
2. Drs. H Agus Luthfi, M.Si selaku dosen pembimbing II. Terimakasih atas bimbingan dan motivasinya selama ini sehingga membuat penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember serta Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis;
5. Dr. Lilis Yuliati, S.E.,M.Si. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
7. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi yang telah membantu kelancaran penelitian dan memberi data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini;

8. Kantor Kecamatan Muncar, Kantor Desa Tembokrejo dan seluruh masyarakat Kecamatan Muncar khususnya masyarakat Desa Kedungrejo yang telah memberikan peluang dan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi ini;
9. Ayahanda Slamet Daroini dan Ibunda Masiyem terima kasih atas segala doa, kasih sayang, semangat, bimbingan, dukungan serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan dapat membahagiakan dan membanggakan kedua orangtua;
10. Adikku tercinta Andris Maulana Efendi yang telah menjadi motivasi penulis untuk terus semangat dan maju menggapai cita-cita;
11. Sahabat-sahabatku Ruby Anike, Illoh Puput dan Nourmala Budi, terimakasih sudah menjadi teman yang baik dan selalu setia menjadi teman keluh kesah penulis dan menjadi sahabat terbaik selama di Jember;
12. Anak kos bu par, terima kasih telah menjadi partner dan teman yang baik selama berada di perantauan;
13. Teman-teman IESP 2013 konsentrasi regional, terimakasih untuk kebersamaannya selama ini;
14. Teman-teman IESP angkatan 2013 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, terimakasih untuk keceriaan, kekeluargaan dan kebersamaannya selama ini;
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Jember, Juni 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	<b>9</b>
2.1.1 Pembangunan Berkelanjutan .....	<b>9</b>
2.1.2 Kelembagaan.....	<b>14</b>
2.1.3 Konsep Biaya Transaksi .....	<b>19</b>
2.1.4 Hubungan Kelembagaan Dengan Biaya Transaksi.....	<b>20</b>
2.1.5 Ekonomi Perikanan .....	<b>22</b>
2.1.6 Masyarakat Nelayan.....	<b>24</b>
2.1.7 Teori Ekonomi Kesejahteraan.....	<b>28</b>
<b>2.2 Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>30</b>

<b>2.3 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>38</b>
<b>3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....</b>	<b>38</b>
<b>3.3 Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>38</b>
3.3.1 Populasi.....	39
3.3.2 Sampel.....	39
<b>3.4 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>39</b>
<b>3.5 Metode Analisis Data .....</b>	<b>40</b>
3.5.1 Peta Sistem.....	43
3.5.2 SWOT Berkelanjutan.....	43
3.5.3 Penilaian Keberlanjutan .....	44
<b>3.6 Definisi Operasioan.....</b>	<b>44</b>
<b>BAB 4. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi.....</b>	<b>46</b>
4.1.1 Kondisi Geografis dan Letak Wilayah.....	46
4.1.2 Kependudukan .....	47
<b>4.2 Gambaran Umum Kecamatan Muncar .....</b>	<b>48</b>
4.2.1 Kondisi Geografis dan Letak Wilayah.....	48
4.2.2 Kependudukan .....	50
<b>4.3 Perikanan di Kecamatan Muncar .....</b>	<b>51</b>
4.3.1 Gambaran Umum Nelayan.....	51
4.3.2 Kondisi Perikanan Tangkap di Kecamatan Muncar .....	52
<b>4.4 Kelembagaan Masyarakat Nelayan di Muncar .....</b>	<b>54</b>
<b>4.5 Metodologi <i>Product Service System</i>.....</b>	<b>56</b>
4.5.1 Dimensi Keberlanjutan Sistem.....	56
4.5.2 Perumusan Alternatif Rekomendasi.....	69
4.5.3 Pengembangan Detail Rekomendasi.....	71
4.5.4 Radar Keberlanjutan .....	72
<b>BAB 5. Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>75</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>75</b>

5.2 Saran ... ..	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Produksi Perikanan Laut di Kecamatan Muncar.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 3.1 Matriks SWOT Berkelanjutan .....	44
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Nelayan per Kecamatan .....	47
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Muncar Tahun 2016 .....	50
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur.....	51
Tabel 4.4 Produksi Perikanan Tangkap di Laut Tahun 2016.....	53
Tabel 4.5 SWOT Keberlanjutan Perikanan Tangkap.....	62
Tabel 4.6 Hasil Penilaian Keberlanjutan Perikanan Tangkap.....	65
Tabel 4.7 Data Produksi Perikanan Tangkap Kecamatan Muncar .....	66
Tabel 4.8 Data Produksi Perikanan Laut (Ikan Lemuru).....	68
Tabel 4.9 Perbandingan Alternatif Perumusan Rekomendasi .....	71

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	37
Gambar 3.1 Tahapan dalam PSS .....	41
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Muncar .....	48
Gambar 4.2 Pembagian Wilayah di Kecamatan Muncar .....	49
Gambar 4.3 Peta Sistem Perikanan tangkap di Kecamatan Muncar .....	60
Gambar 4.4 Radar Keberlanjutan Dimensi Ekonomi .....	72
Gambar 4.5 Radar Keberlanjutan Dimensi Lingkungan .....	73
Gambar 4.6 Radar Keberlanjutan Dimensi Sosial Budaya .....	74

**LAMPIRAN**

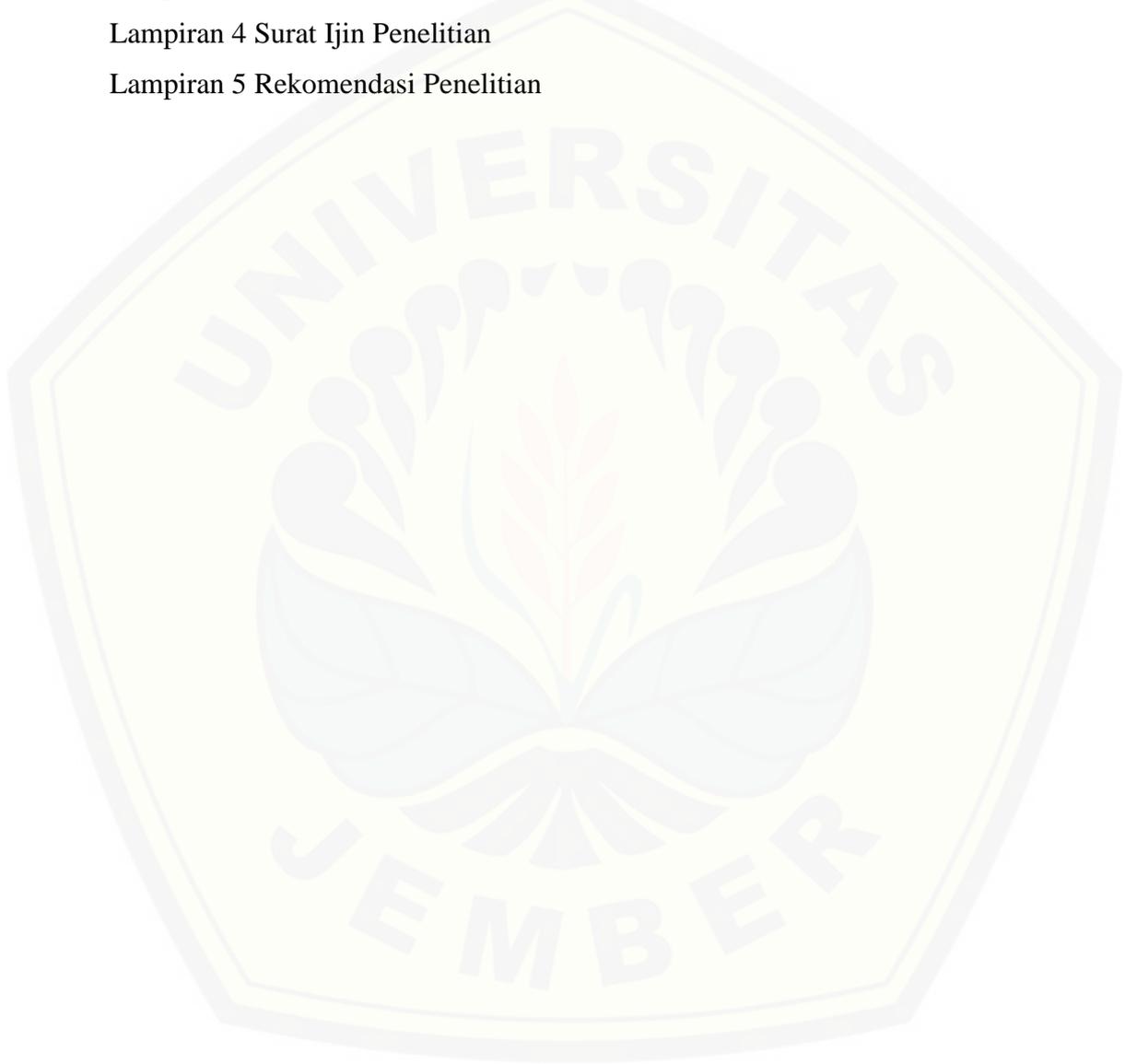
Lampiran 1 Kuesioner Penilaian Keberlanjutan

Lampiran 2 Daftar Nama Responden

Lampiran 3 Hasil Penilaian Keberlanjutan

Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 5 Rekomendasi Penelitian





## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayahnya terdiri dari daratan dan perairan, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan agraris, maka Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi dan hayati yang beragam (Wibowo, 2014). Indonesia menjadi negara kepulauan (*archipelagic state*) terluas di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau dan panjang garis pantai mencapai  $\pm 81.000$  km (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014). Garis pantai di Indonesia ini merupakan yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Total luas laut Indonesia sekitar 3.544 juta km<sup>2</sup> atau sekitar 70% dari luas wilayah Indonesia, keadaan tersebut harusnya menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sektor riil yang potensial di Indonesia (Putra, 2011). Sumberdaya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia dinilai memiliki tingkat keragaman hayati (*bio-diversity*) paling tinggi. Sumberdaya tersebut paling tidak mencakup 37% dari spesies ikan di dunia (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1994). Di wilayah perairan laut Indonesia terdapat beberapa jenis ikan bernilai ekonomis tinggi antara lain : tuna, cakalang, udang, tongkol, tenggiri, kakap, cumi-cumi, ikan-ikan karang (kerapu, baronang, udang barong/lobster), ikan hias dan kerang termasuk rumput laut (Barani, 2004).

Subsektor perikanan mempunyai peranan yang cukup penting, terutama menghasilkan protein hewani dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, meningkatkan ekspor, menyediakan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta mendukung pembangunan wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian dan fungsi lingkungan hidup (Evy, 2001). Potensi perikanan di laut Indonesia dapat memberikan manfaat besar jika dapat dikelola dengan baik dan tentunya bertanggungjawab, hal ini berkaitan dengan adanya pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan terutama perikanan tangkap. Namun mencermati pembangunan Indonesia selama ini sangatlah ironis karena secara empiris dengan potensi yang besar, pembangunan sektor perikanan kurang mendapatkan perhatian dan selalu diposisikan sebagai

pinggiran. Hal ini terjadi karena selama ini strategi pembangunan yang berbasis sumberdaya alam lebih mengutamakan kepada sektor pertanian dan pertambangan. Selain itu penekanan pembangunan sektor perikanan selama ini lebih bersifat eksploitasi sumberdaya sehingga mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem lingkungan dan tidak memperhatikan nilai tambah ekonomis yang dapat diperoleh dari sektor tersebut (Putra, 2011).

Sumberdaya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumberdaya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (*primer mover*) ekonomi nasional (Mariani, *et.al.* 2014). Hal ini tercermin dari besaran sumbangan sektor perikanan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di tahun 2016 potensi perikanan tangkap di Indonesia mencapai angka 9,9 juta ton dimana angka ini akan terus meningkat di tahun berikutnya seiring berkurangnya kapal asing pencuri ikan yang beredar di perairan Indonesia.

Kondisi ini terjadi karena sumberdaya laut yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan bersifat *open access*. Dampak lebih lanjut dari sumberdaya bersifat *open access* adalah pertama menyebabkan masyarakat nelayan yang sumber mata pencaharian utamanya bergantung pada sumberdaya laut dan perikanan seringkali harus berpindah-pindah untuk memperoleh hasil tangkapan yang maksimal. Kedua, pola dan aktivitas mata pencaharian yang bersifat *open access* berpengaruh terhadap kebudayaan, kelembagaan dan kearifan lokal masyarakat nelayan dan pesisir Indonesia. Pada sepanjang pantai dan pesisir kepulauan Indonesia ini terdapat sejumlah tradisi, kelembagaan dan kearifan lokal yang berbeda-beda (Hidayat, 2013). Sifat sumberdaya lautan *open access* sering menyebabkan penggunaan yang kurang bertanggungjawab atau mengabaikan pemeliharaan kelestarian karena masyarakat beranggapan bahwa mereka bebas untuk mengambil sumberdaya yang ada tanpa kendali (Nurhayati, 2013).

Isu yang saat ini sering terjadi yaitu permasalahan kerusakan ekosistem laut, salah satunya disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya perikanan yang berlebih (*overfishing*) di beberapa kawasan perairan di Indonesia. Hal ini berdampak pada ketidakberlanjutan pemanfaatan sumberdaya perikanan, karena

menyebabkan kerusakan ekosistem di laut. Pembangunan yang berkelanjutan pada subsektor perikanan khususnya perikanan tangkap pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja, serta dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

Dalam pembangunan perikanan, tantangan untuk memelihara sumberdaya secara berkelanjutan merupakan permasalahan yang cukup kompleks. Sumberdaya perikanan dikategorikan sebagai sumberdaya yang dapat pulih, namun pertanyaan yang sering muncul adalah seberapa besar ikan dapat dipanen tanpa harus menimbulkan dampak negatif untuk masa mendatang. Keberlanjutan adalah merupakan kata kunci dalam pembangunan perikanan yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat perikanan itu sendiri (Fauzi dan Anna, 2002). Sumberdaya perikanan merupakan asset alam yang diekstraksi untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia. Namun demikian, aspek manfaat ini memiliki berbagai dimensi, baik dimensi ekonomi, ekologi maupun sosial. Kompleksitas sumberdaya ikan ini menyebabkan tujuan pembangunan perikanan juga semakin kompleks (Mariani, *et.al.* 2014).

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai luas laut 208.138 km<sup>2</sup> yang di dalamnya meliputi Selat Madura, Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia dengan panjang garis pantai sejauh 1.600 km. Panjangnya garis pantai tersebut melewati beberapa kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan terbesar dan salah satunya yaitu Kabupaten Banyuwangi (Agustine, dkk. 2012). Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai potensi perikanan tangkap. Kegiatan perikanan tangkap berkembang dengan baik di Kabupaten Banyuwangi, karena perairan sekitar (Selat Bali) merupakan daerah *up-welling* yang banyak membawa *nutrient* sehingga cocok untuk perkembangan sumberdaya ikan terutama dari jenis ikan lemuru (Mustaruddin, 2012).

Salah satu daerah yang memiliki pelabuhan perikanan terbesar di Kabupaten Banyuwangi adalah Kecamatan Muncar yang berbatasan langsung dengan Selat Bali dan menjadikan Muncar sebagai salah satu *fishing base* dari produksi ikan khususnya ikan lemuru di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Pratama dkk, 2016). Kecamatan Muncar merupakan penyumbang utama hasil perikanan tangkap di Kabupaten Banyuwangi yaitu 94,03% dari sebelas kecamatan penyumbang pendapatan asli daerah di sektor perikanan tangkap. Daerah penangkapan ikan nelayan di Muncar sendiri pada dasarnya adalah perairan Selat Bali dengan luas total  $\pm 2.500 \text{ km}^2$  yang dibagi menjadi dua yaitu paparan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sebagai selat, perairan Selat Bali memiliki pasokan ikan yang melimpah khususnya ikan lemuru yang mendominasi tangkapan nelayan Muncar yaitu  $\pm 80\%$  dari semua total hasil tangkapan ikan nelayan Muncar (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2012).

Hasil tangkapan ikan di Muncar yang melimpah berbanding lurus dengan jumlah nelayan yang ada di Kecamatan Muncar. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Banyuwangi tahun 2015, jumlah tenaga kerja yang bekerja di subsektor perikanan mencapai angka 45,77 persen dari seluruh total tenaga kerja di sektor pertanian. Profesi menjadi nelayan di Kecamatan Muncar menjadi salah satu pilihan utama karena dianggap bahwa profesi ini merupakan cara hidup yang diwariskan turun temurun. Menjadi seorang nelayan merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar penduduk di Kecamatan Muncar, mereka menggantungkan hidupnya dari hasil melaut. Selain itu, sumberdaya perikanan di perairan Selat Bali yang berada di kawasan Muncar juga mendukung untuk dijadikan sebagai ladang penghasilan oleh para nelayan. Sumberdaya perikanan sangat melimpah dan memiliki ragam jenis ikan yang cukup banyak. Sebagian besar nelayan ini mendiami dua desa di Kecamatan Muncar, yaitu di Desa Tembokrejo dan Desa Kedungrejo, di Desa Kedungrejo sendiri hampir dari 90 persen masyarakatnya berprofesi sebagai seorang nelayan. Desa Kedungrejo letaknya berada di tengah Kecamatan Muncar dan tidak jauh dari tepi pantai, sehingga tidak heran jika banyak yang memilih untuk menjadi seorang nelayan.

Tabel 1.1 Data Produksi Perikanan Laut di Kecamatan Muncar Tahun 2011-2016

No	Tahun	Volume Produksi (kg)
1	2011	38.328.993
2	2012	28.313.788
3	2013	21.466.872
4	2014	21.141.772
5	2015	31.265.500
6	2016	15.772.440

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Maret 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat produksi perikanan tangkap di Kecamatan Muncar cenderung fluktuatif. Volume produksi perikanan laut di Kecamatan Muncar menurun drastis di tahun 2016 dimana terjadi penurunan hasil tangkapan yang semula di tahun 2015 hasil tangkapan mencapai 30.000 ribu ton turun menjadi 15.000 ton. Berdasarkan keterangan dari UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Muncar, sejak pertengahan tahun 2016 hasil tangkapan para nelayan memang mengalami penurunan. Jumlah ikan yang biasanya sangat melimpah kini semakin menurun. Saat seperti ini biasa disebut sebagai musim paceklik, musim dimana para nelayan berbondong-bondong menjual segala perabotan rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab turunnya hasil tangkapan nelayan Muncar, diantaranya faktor alam dan manusia. Faktor alam berperan dalam keberlanjutan perikanan tangkap, dimana alam yang menyediakan kebutuhan para nelayan yaitu berupa ikan. Namun sejak pertengahan tahun 2016 hasil tangkapan ikan terus menurun, bahkan tidak ada sama sekali. Menurut kepercayaan nelayan setempat, hal ini karena fluktuasi musim dan pergerakan ikan yang semakin tidak dapat diprediksi. Selain itu, faktor manusia diduga juga menjadi salah satu penyebab langkanya ikan di wilayah Selat Bali ini, dimana pada sekitaran tahun 1980 hingga 1990-an banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan bahan kimia untuk menangkap ikan, dampaknya berakibat pada pertumbuhan ikan di masa sekarang.

Dari segi kelembagaan, para nelayan di Kecamatan Muncar memiliki ketergantungan penuh terhadap para pemilik modal atau yang sering disebut dengan juragan darat. Juragan darat yaitu mereka yang memfasilitasi para nelayan untuk melaut, atau mereka yang memiliki kapal juga peralatan untuk melaut lainnya namun tidak ikut turun ke laut untuk mencari ikan. Nelayan bisa melaut jika juragan darat memberikan modal seperti pinjaman kapal dan juga keperluan melaut seperti uang untuk membeli solar dan juga kebutuhan selama melaut. Selain juragan darat, dikenal juga juragan laut oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Muncar, mereka yaitu juragan yang terjun langsung untuk melaut dan sekaligus menjadi kapten di kapal atau bisa disebut sebagai komandan kapal. Juragan laut sendiri sebenarnya bukanlah pemilik modal, melainkan seorang pimpinan kapal saat melaut dan sebagai penunjuk letak ikan. Juragan laut mengambil bagian paling banyak dibandingkan awak kapal sama halnya dengan juragan darat dan sistem ini sudah menjadi sebuah tradisi.

Selama ini para nelayan memiliki ketergantungan penuh terhadap para juragan baik juragan darat maupun laut, karena tanpa keberadaan mereka para nelayan tidak akan bisa mencari ikan di laut dan mereka juga memiliki keterikatan penuh terutama terhadap juragan darat selaku pemilik modal. Hal ini terjadi besarnya modal yang diperlukan untuk melaut, para nelayan terutama nelayan buruh tidak memiliki kemampuan menyediakan modal untuk melaut dengan biaya besar sedangkan pendapatan yang diterima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pemanfaatan sumberdaya laut yang di Kecamatan Muncar belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, dimana sebagian besar nelayan masih berada pada tingkat perekonomian yang rendah. Dengan potensi sumberdaya laut yang cukup besar namun tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan yang masih rendah menjadi sebuah pertanyaan bagaimana selama ini pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap yang ada dalam menunjang perekonomian para nelayan. Ketimpangan juga terjadi di kehidupan ekonomi rumah tangga para nelayan, nelayan yang memiliki kapal atau

juragan tingkat kesejahteraan hidupnya sangat tinggi, namun untuk para nelayan buruh tingkat kesejahteraan hidupnya masih rendah.

Selain itu, pemanfaatan berlebih (*overfishing*) sumberdaya ikan terjadi di perairan Selat Bali, dimana dampak yang ditimbulkan yaitu semakin berkurangnya hasil tangkapan ikan hingga menyebabkan kelangkaan terhadap beberapa jenis ikan. Salah satu jenis ikan yang sudah tidak bisa ditemui yaitu ikan lemuru (ikan sarden) yang dulu menjadi komoditas unggulan para nelayan di Kecamatan Muncar. Lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan belum optimalnya pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan menjadi salah satu penyebab semakin langkanya ikan di perairan Selat Bali sehingga produksi perikanan tangkap semakin menurun setiap tahunnya dan berakibat pada menurunnya kesejahteraan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut.

Konsep pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk mengelola sumberdaya perikanan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang bertumpu pada sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta tetap menjaga kelestarian laut mengingat bahwa potensi dari sumber daya laut sangatlah besar dan dapat digunakan sebagai harapan pembangunan di masa depan. Keberlanjutan bukan hanya memperhatikan dari segi ekonomi, namun juga dari segi sosial terutama lingkungan (ekologi). Upaya pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal, berkelanjutan dan lestari menjadi tuntutan yang sangat mendesak bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang menopangkan kehidupannya dari hasil laut. Pembangunan berkelanjutan pada akhirnya tidak hanya memperhatikan dari segi ekonomi semata, namun juga dari segi ekologi dan sosial.

Dalam penelitian ini menganalisis strategi pembangunan berkelanjutan sumberdaya perikanan tangkap yang ada di Kecamatan Muncar yang menjadi salah satu arah tujuan pembangunan di Indonesia saat ini, serta melihat kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan di Kecamatan Muncar dalam menunjang kesejahteraan ekonomi para nelayan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Muncar
2. Bagaimana sistem tata kelola perikanan tangkap yang ada di Kecamatan Muncar kaitannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat nelayan

## 1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pembangunan berkelanjutan perikanan tangkap yang ada di Kecamatan Muncar. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis kelembagaan ekonomi di lingkungan masyarakat nelayan Kecamatan Muncar
2. Untuk mengetahui sistem tata kelola perikanan tangkap yang ada di Kecamatan Muncar kaitannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat nelayan

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan di subsektor perikanan khususnya perikanan tangkap
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan sub sektor perikanan khususnya perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui kebijakan dari pemerintah.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pembangunan Berkelanjutan

##### a. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Secara etimologis, istilah keberlanjutan (*sustainability*) berasal dari bahasa Latin *sustinere* yakni *tenere berarti menahan atau menyangga, dan sus* berarti ke atas. Kata ini berarti mendukung, memelihara, dan mempertahankan (Onions, 1964). Lahirnya konsep dan strategi pembangunan berkelanjutan berawal dari era 1980-an saat sejumlah lembaga internasional seperti *World Conservation Strategy* (WCS) dari PBB berupaya mengintegrasikan strategi kebijakan lingkungan dan ekonomi, hal ini mendorong PBB membentuk *Brundtland Commision* tahun 1983 (Ravago, 2009).

Pembangunan berkelanjutan bermula dari permasalahan lingkungan yang diangkat oleh WCED (*World Commision on Environment and Development*) dalam konferensi Stockholmtahun 1972. Menurut *Bruntland Commision*, “*Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”. Konsep tersebut menyatakan bahwa pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang dilakukan tanpa mengurangi kemampuan generasi akan datang untuk memenuhi kebutuhannya (*United Nations General Assembly, 1987; WCED, 1987*). Namun WCED belum dapat mengartikulasikan bagaimana kebijakan (konservasi) lingkungan mempengaruhi kebijakan ekonomi dan bagaimana kebijakan ekonomi berdampak terhadap degradasi lingkungan (Pearce et al., 1989). *Brundtland Commission* mengeksaminasi pola hubungan antara aktivitas manusia dan lingkungan, dan implikasinya terhadap kebijakan ekonomi dan lingkungan. Asumsi dasarnya ialah lingkungan alam adalah sumber pokok dari SDA dan mendukung atau menyangga kehidupan manusia (Daily, 1997). Oleh karena itu, pelestarian lingkungan alam adalah hal esensial dari konsep SD (*Goodland, 1995*). Selanjutnya dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa

pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan yang berkelanjutan mengandung dua konsep yang amat penting yaitu (Luhulima, 1998) :

- a) Konsep kebutuhan terutama kebutuhan dasar orang-orang miskin yang harus mendapat prioritas utama.
- b) Ide batasan yang dipaksakan oleh tingkat perkembangan teknologi dan organisasi sosial atas kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan pembangunan berwawasan jangka panjang yang meliputi jangka waktu antar generasi dan berupaya menyediakan sumberdaya yang cukup dan lingkungan yang sehat sehingga dapat mendukung kehidupan. Kemunculan konsep ini berkaitan erat dengan kesadaran tentang tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dengan inti pada kepentingan ekonomi. Konsep ini mengandung asumsi bahwa sifat sebuah pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus didasarkan atau sesuai dengan perencanaan infrastrukturnya. Selain itu, konsep pembangunan konvensional yang selama ini dianut memang telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun gagal dalam aspek sosial dan lingkungan. Hal ini terjadi karena pembangunan konvensional meletakkan pembangunan ekonomi pada pusat persoalan pertumbuhan dan menempatkan faktor sosial dan lingkungan pada posisi yang kurang penting. Hal ini juga yang mendasari munculnya konsep pembangunan berkelanjutan, dimana selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Inti penting dari pembangunan berkelanjutan adalah pertumbuhan serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berkelanjutan adalah ciri dari model pembangunan modern dan manusia merupakan inti dari model ini. Dalam kerangka pembangunan modern ini, kegiatan produksi dan konsumsi dapat

dilestarikan jika dilakukan dengan cara-cara yang tidak membahayakan lingkungan atau jika kegiatan yang dilakukan ramah terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa didukung oleh sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan pengamanan lingkungan. Dengan kata lain, sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (Sudirman, 2007).

Keberlanjutan atau *sustainability* dalam pengelolaan sumber daya perikanan mengandung makna bahwa eksploitasi sumberdaya dijaga pada tingkat yang tidak mengakibatkan penurunan produktivitas perikanan di masa depan. Perikanan berkelanjutan atau *sustainable fisheries* hanya dapat diwujudkan jika jumlah ikan yang ditangkap tidak melebihi jumlah ikan yang dibutuhkan untuk mempertahankan stok ikan tetap lestari (Purwaningsih, 2015).

#### b. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan

Sumberdaya ikan harus dikelola dan ditata karena sumberdaya itu sangat sensitif terhadap tindakan atau aksi manusia. Pengelolaan, penataan, atau dalam terminologi yang lebih umum, manajemen sumberdaya perikanan patut dilakukan supaya pembangunan perikanan dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan pembangunan dapat tercapai (Nikijuluw, 2005). Setiap negara menetapkan tujuan dan prioritas manajemen sumberdaya perikanan yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang ekonomi, sosial, teknologi, dan politik. Indonesia menempatkan manajemen sumberdaya perikanan pada visi pembangunan perikanan dan kelautannya. Visi pembangunan perikanan Indonesia adalah mewujudkan usaha perikanan produktif dan efisien berdasarkan pengelolaan (manajemen) sumberdaya perikanan secara bertanggung jawab (DKP, 2001 dalam Nikijuluw, 2005).

Upaya pengelolaan sumberdaya harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumberdaya itu sendiri beserta lingkungannya. Pengelolaan perikanan bersifat kompleks mencakup aspek biologi, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan politik. Tujuan dikelolanya perikanan antara lain

tercapainya optimalisasi ekonomi pemanfaatan sumberdaya ikan sekaligus terjaga kelestariannya. Menurut Cochrane (2002) dalam Mulyana (2007), tujuan (*goal*) umum dalam pengelolaan perikanan meliputi 4 (empat) aspek yaitu biologi, ekologi, ekonomi, dan sosial. Tujuan sosial meliputi tujuan-tujuan politis dan budaya. Contoh masing-masing tujuan tersebut yaitu:

- 1) untuk meminimalkan dampak penangkapan ikan bagi lingkungan fisik serta sumberdaya non-target (*by-catch*), serta sumberdaya lainnya yang terkait (tujuan ekologi);
- 2) untuk memaksimalkan pendapatan nelayan (tujuan ekonomi);
- 3) untuk memaksimalkan peluang kerja atau mata pencaharian nelayan atau masyarakat yang terlibat (tujuan sosial).

Definisi dalam upaya mengelola sumberdaya perikanan yang ada pada UU No. 45 tahun 2009 perubahan UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan mengacu kepada FAO dalam Fisheries Technical Paper No. 424 yang diedit oleh Cochrane (2002) dalam Mulyana (2007) yaitu: *"The integrated process of information gathering, analysis, planning, consultation, decision-making, allocation of resources and formulation of implementation, with enforcement as necessary, of regulation or rules which govern fisheries activities in order to ensure the continued productivity of the resources and the accomplishment of other fisheries objectives"*.

Menurut Gulland (1982) dalam Nabunome (2007), tujuan pengelolaan sumberdaya perikanan meliputi:

- 1) Tujuan yang bersifat fisik-biologik, yaitu dicapainya tingkat pemanfaatan dalam level maksimum yang lestari (MSY= *Maksimum Sustainable Yield*).
- 2) Tujuan yang bersifat ekonomik, yaitu tercapainya keuntungan maksimum dari pemanfaatan sumberdaya ikan atau maksimalisasi profit (*net income*) dari perikanan
- 3) Tujuan yang bersifat sosial, yaitu tercapainya keuntungan sosial yang maksimal, misalnya maksimalisasi penyediaan pekerjaan, menghilangkan adanya konflik kepentingan diantara nelayan dan anggota masyarakat lainnya.

Adapun Dwiponggo (1983) dalam Suharno (2008) tujuan pengelolaan sumberdaya perikanan dapat dicapai dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Pemeliharaan proses kelangsungan sumberdaya perikanan dengan memelihara ekosistem penunjang bagi kehidupan sumberdaya ikan;
- 2) Menjamin pemanfaatan berbagai jenis ekosistem secara berkelanjutan;
- 3) Menjaga keanekaragaman hayati (plasma nutfah) yang mempengaruhi ciri-ciri, sifat dan bentuk kehidupan;
- 4) Mengembangkan perikanan dan teknologi yang mampu menumbuhkan industri yang mengamankan sumberdaya secara bertanggung jawab.

Tujuan-tujuan itu menurut Pinkerton (1988) dalam Nikijuluw (2002), tidak dapat tercapai secara otomatis tetapi dapat dicapai melalui beberapa kegiatan yang intinya merupakan komponen manajemen sumberdaya perikanan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan dan analisis data. Data yang dikumpulkan dan dianalisis meliputi seluruh variabel atau komponen yang berkaitan dengan sumberdaya perikanan.
- 2) Prioritas patut diberikan kepada data biologi, produksi dan penangkapan ikan yang merupakan informasi dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Namun, data sosial ekonomi nelayan dan aspek legal perikanan tidak boleh dilupakan.
- 3) Penetapan cara-cara pemanfaatan sumberdaya ikan meliputi perizinan, waktu, serta lokasi penangkapan.
- 4) Penetapan alokasi penangkapan ikan (berapa banyak ikan yang boleh ditangkap) antar nelayan dalam satu kelompok dengan kelompok nelayan yang lain atau nelayan yang berbeda alat tangkap dan metode penangkapan ikan.
- 5) Perlindungan terhadap sumberdaya ikan yang mengalami tekanan ekologis akibat penangkapan ataupun kejadian alam.
- 6) Penegakan hukum dan perundang-undangan tentang pengelolaan sumberdaya perikanan.

- 7) Pengembangan dan perencanaan pengelolaan sumberdaya perikanan dalam jangka panjang yang ditempuh melalui evaluasi terhadap program kerja jangka pendek atau yang saat itu sedang diimplementasikan.
- 8) Pengambilan keputusan manajemen sumberdaya perikanan dengan mempertimbangkan pengertian yang sempit, yaitu sumberdaya ikan itu sendiri maupun pengertian yang luas - sumberdaya ikan beserta seluruh aspek yang berpengaruh atau dipengaruhi pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut.

### 2.1.2 Kelembagaan

Pada dekade tahun 1980-an, pembahasan tentang institusi atau kelembagaan mulai berkembang dalam ilmu ekonomi, hal tersebut dikarenakan sudah semakin banyak para ekonom yang menyadari bahwa kegagalan pembangunan ekonomi pada umumnya disebabkan oleh kegagalan institusi. Perkembangan tentang kajian peranan institusi di dalam pembangunan ekonomi tersebut melahirkan suatu cabang baru ilmu ekonomi yang dikenal dengan ilmu ekonomi kelembagaan (*institutional economics*). Ekonomi kelembagaan ini menekankan analisisnya pada pengaruh biaya transaksi (*transaction costs*).

Pada umumnya, kelembagaan lebih banyak dibahas dalam ilmu sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang seiring berjalannya waktu ilmu kelembagaan berkembang ke dalam ilmu ekonomi. Hal ini terjadi karena saat ini mulai banyak ekonom yang memberikan kesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya disebabkan karena kegagalan kelembagaan. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat. Dalam bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk kepentingan bersama atau umum (*pubic*). Ilmu psikologi melihat kelembagaan dari sudut tingkah laku manusia (*behaviour*). Ilmu hukum menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, aturan dan penegakan hukum serta instrument dan proses litigasinya (Djogo, dkk. 2003).

Israel (1992) mengungkapkan bahwa konsep umum mengenai lembaga meliputi apa yang ada pada tingkat lokal atau masyarakat, unit manajemen proyek, institusi-institusi, departemen-departemen di pemerintah pusat dan sebagainya. Sebuah lembaga dapat merupakan milik negara atau sektor swasta dan juga bisa mengacu pada fungsi-fungsi administrasi pemerintah. Menurut Uphoff dalam Shahyuti (2003), istilah kelembagaan dan organisasi sering membingungkan dan bersifat *interchangeably*. Secara keilmuan, *social institution* dan *social organization* berada dalam level yang sama untuk dikenal sebagai suatu sosial grup, sosial form, dan lainnya yang bersifat sejenis. Namun pada perkembangannya saat ini istilah kelembagaan lebih sering dipakai untuk makna yang mencakup keduanya sekaligus. Istilah kelembagaan lebih dipilih karena kata organisasi menunjuk pada suatu sosial form yang bersifat formal, dan cenderung terkesan negatif.

#### a. Definisi Kelembagaan atau Institusi

Menurut North (1991) dalam Arsyad (2010), institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan (*constraints*) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal (misalnya: peraturan-peraturan, undang-undang, konstitusi) dan aturan-aturan informal (misalnya: norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem nilai) serta proses penegakan aturan tersebut (*enforcement*). Secara bersama-sama aturan-aturan tersebut menentukan struktur insentif bagi masyarakat, khususnya perekonomian. Aturan-aturan tersebut diciptakan manusia untuk membuat tatanan (*order*) yang baik dan mengurangi ketidakpastian (*uncertainty*) di dalam proses pertukaran.

Sementara itu, Wiliamson (2000) merinci lagi institusi sebagai aturan main ke dalam empat tingkatan institusi berdasarkan analisis sosial, yakni :

- 1) Tingkatan pertama adalah tingkatan lekat sosial (*social embeddedness*) dimana institusi telah melekat (*embeddedness*) dalam waktu yang sangat lama di dalam masyarakat dan telah menjadi pedoman masyarakat dalam hidup dan berkehidupan. Tingkatan ini sering juga disebut sebagai institusi informal,

misalnya: adat, tradisi, norma dan agama. Agama sangat berperan penting pada tingkatan ini, institusi pada tingkatan ini berubah sangat lambat antara satu abad sampai satu millennium. Lambatnya perubahan institusi pada tingkatan ini karena institusi ini dapat diterima dan diakui oleh masyarakatnya antara lain: institusi tersebut bersifat fungsional (seperti konvensi), dianggap sebagai nilai simbolis bagi penganutnya dan seringkali institusi tersebut bersifat komplementer dengan institusi formal yang ada.

- 2) Tingkatan kedua disebut dengan lingkungan kelembagaan (*institutional environment*) yang sering juga disebut sebagai aturan main formal. Institusi pada tingkatan ini berkaitan dengan aturan hukum (khususnya hak kepemilikan), konstitusi, peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga yudikatif dan birokrasi. Institusi pada tingkatan ini diharapkan akan menciptakan aturan main formal yang baik (*first-order economizing*). Alat rancangan pada tingkatan kedua ini mencakup fungsi-fungsi eksekutif, legislative, yudikatif dan fungsi birokrasi dari pemerintahan serta distribusi kekuasaan antara berbagai tingkat pemerintahan. Pengertian dan pelaksanaan hak kepemilikan dan hukum kontrak merupakan hal utama pada tingkatan kedua ini. Sistem perusahaan swasta (*private-enterprise*) tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya hak kepemilikan akan sumber daya. Adanya hak kepemilikan akan memaksa orang yang ingin menggunakan sumber daya tersebut untuk membayar kepada pemiliknya. Setelah hak kepemilikan ditetapkan dan dilaksanakan, pemerintah menjaga (melalui regulasi) agar sumber daya digunakan pada tingkat penggunaan yang terbaik.
- 3) Tingkatan ketiga yaitu tentang tata kelola (*governance*) yang baik agar biaya transaksi (*transaction costs*) dapat diminimumkan. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan, pengaturan dan penegakan sistem kontrak dengan baik. Sistem tata kelola ini bertujuan untuk menciptakan tatanan (*order*) yang baik agar dapat mengurangi konflik dan menghasilkan manfaat bersama (*mutual gains*). Tujuan institusi pada tingkatan ini adalah menciptakan tata kelola yang baik (*second-order economizing*).

- 4) Tingkatan keempat adalah institusi yang mengatur alokasi sumber daya dan pengerjaan (*employment*). Institusi ini mengatur hubungan principal dan agen atau lebih dikenal dengan teori keagenan (*agency theory*). Hubungan ini akan berjalan efisien jika ada sistem insentif (*reward and punishment*) diantara mereka dirancang dengan baik.

Djogo, dkk (2003) menyebutkan bahwa pada umumnya definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam konteks ini sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau organisasi untuk harus berpikir positif ke arah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka tetapi juga pemahaman akan lembaga ini memusatkan perhatian pada pengertian mengapa orang berpikir atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada.

Kelembagaan berisikan dua aspek penting yaitu “aspek kelembagaan” dan “aspek keorganisasian”. Aspek kelembagaan meliputi perilaku atau perilaku sosial dimana inti kajiannya adalah tentang nilai (*value*), norma (*norm*), *custom*, *mores*, *folkways*, *usage*, kepercayaan, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi dan lain-lain. Bentuk perubahan sosial dalam aspek kelembagaan bersifat kultural dan proses perubahannya membutuhkan waktu yang lama. Sementara dalam aspek keorganisasian meliputi struktur atau struktur sosial dengan inti kajiannya terletak pada aspek peran (*role*). Lebih jauh aspek struktural mencakup peran, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, struktur umum, perbandingan struktur tekstural dengan struktur factual, struktur kewenangan atau kekuasaan, hubungan antar kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek solidaritas, profil dan pola kekuasaan. Bentuk perubahan sosial dalam aspek keorganisasian bersifat struktural dan berlangsung relatif cepat (Subagio, 2005).

#### c. Manfaat dan Fungsi Kelembagaan

Institusi dibangun manusia untuk menciptakan tatanan yang baik (*order*) dan mengurangi ketidakpastian (*uncertainty*) di dalam kehidupan masyarakat.

Institusi merupakan landasan bagi keberadaan suatu masyarakat yang beradab. Tanpa adanya institusi, tidak akan pernah ada masyarakat, yang ada hanyalah sekelompok “binatang-binatang yang berakal” yang senantiasa akan berusaha untuk memenuhi tuntutan hasratnya yang kadang tidak terbatas, sehingga kerusuhan, penjarahan dan kriminalitas menjadi sebuah hal yang biasa (Kurnia, 2012). Selama ini para ekonom neoklasik (konvensional) menaifkan peran institusi, mereka memandang bahwa sistem mekanisme pasar merupakan penggerak roda perekonomian yang terbaik. Menurut Veblen seorang ekonom dan sosiolog berkebangsaan Amerika menyatakan bahwa sebuah institusi dan lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan pola perilaku ekonomi masyarakat. Struktur politik dan sosial yang tidak mendukung akan menyebabkan timbulnya distorsi dalam setiap proses ekonomi.

Menurut North, peran institusi formal maupun institusi informal sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Tanpa adanya institusi yang baik, biaya transaksi (*transaction cost*) dalam setiap kegiatan ekonomi akan menjadi lebih tinggi. Kehadiran institusi sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonomi di dalam pasar. Institusi yang baik akan mampu menciptakan persaingan yang adil dan dinamis. Menurut North, institusi sangat menentukan kemajuan ekonomi suatu bangsa. Institusi tersebut mencakup tradisi sosial, budaya, politik, hukum dan ideologi. Peran institusi sangat sentral dalam pembangunan ekonomi. Menurut Rodrik (2003) dalam Arsyad (2010), ada empat fungsi institusi dalam kaitannya dengan mendukung kinerja perekonomian, yaitu :

- 1) Menciptakan pasar (*market creating*) yaitu institusi yang melindungi hak kepemilikan dan menjamin pelaksanaan kontrak
- 2) Mengatur pasar (*market regulating*) yaitu institusi yang bertugas mengatasi kegagalan pasar yakni institusi yang mengatur masalah eksternalitas, skala ekonomi (*economies of scale*) dan ketidaksempurnaan informasi untuk menurunkan biaya transaksi (misalnya: lembaga-lembaga yang mengatur telekomunikasi, transportasi dan jasa-jasa keuangan)

- 3) Menjaga stabilitas (*market stabilizing*) yaitu institusi yang menjaga agar tingkat inflasi rendah, meminimumkan ketidakstabilan makroekonomi dan mengendalikan krisis keuangan (misalnya: bank sentral, sistem devisa, otoritas moneter dan fiskal)
- 4) Melegitimasi pasar (*market legitimizing*) yaitu institusi yang memberikan perlindungan sosial dan asuransi, termasuk mengatur redistribusi dan mengelola konflik (misalnya: sistem pensiun, asuransi untuk pengangguran dan dana-dana sosial lainnya).

### 2.1.3 Konsep Biaya Transaksi

Furubotn & Richter (2000) menyatakan bahwa biaya transaksi adalah ongkos untuk menggunakan pasar (*market transaction costs*) dan biaya melakukan hak untuk memberikan pesanan di dalam perusahaan (*managerial transaction costs*). Disamping itu, ada juga rangkaian biaya yang diasosiasikan untuk menggerakkan dan menyesuaikan dengan kerangka politik kelembagaan (*political transaction costs*). Untuk masing-masing tiga jenis biaya transaksi tersebut dapat dibedakan menurut dua tipe, yaitu (1) biaya transaksi tetap (*fixed transaction cost*), yaitu investasi spesifik yang dibuat dalam menyusun kesepakatan kelembagaan (*institutional arrangements*); dan (2) biaya transaksi variabel (*variable transaction cost*), yaitu biaya yang tergantung pada jumlah atau volume transaksi.

Yustika (2008) menyatakan bahwa pada poin ini, sifat dari biaya transaksi sama dengan ongkos produksi. Pada keduanya mengenal konsep biaya tetap dan biaya variabel. Akan tetapi, dalam identifikasi yang mendalam, tentu membedakan antara biaya tetap dan variabel dalam biaya transaksi tidak mudah apabila membandingkannya dalam biaya produksi. Abdullah *et.al* (2008) mengelompokkan biaya transaksi dalam *co-management* perikanan menjadi tiga kategori, yaitu (i) biaya informasi, (ii) biaya pengambilan keputusan bersama, dan (iii) biaya operasional. Kategori pertama dan kedua merupakan biaya transaksi sebelum kegiatan kontrak (*ex ante transaction cost*) sedangkan kategori ketiga merupakan biaya transaksi sesudah kegiatan kontrak (*ex post transaction cost*).

Masing-masing kategori memiliki beberapa turunan aktivitas yang memungkinkan terdapatnya biaya transaksi. Pertama, biaya informasi mencakup beberapa aktivitas, yaitu (a) upaya untuk mencari dan memperoleh pengetahuan tentang sumberdaya, (b) memperoleh dan menggunakan informasi, dan (c) biaya penyusunan strategi dan *free riding*. Kedua, biaya pengambilan keputusan bersama mencakup beberapa aktivitas, yaitu (a) menghadapi permasalahan di bidang perikanan, (b) keikutsertaan dalam pertemuan atau rapat, (c) membuat kebijakan atau aturan, (d) menyampaikan hasil keputusan, dan (e) melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang di tingkat lokal dan pusat. Ketiga, sementara biaya operasional bersama dalam *co-management* perikanan dijabarkan lagi menjadi tiga kelompok biaya, masing-masing kelompok mencakup beberapa kegiatan. Ketiga kelompok biaya tersebut adalah :

- 1) Biaya pemantauan, penegakan dan pengendalian terdiri dari pemantauan aturan-aturan perikanan, pengelolaan laporan hasil tangkapan, pemantauan lokasi penangkapan, pemantauan input untuk kegiatan penangkapan, manajemen atau resolusi konflik, serta pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran;
- 2) Biaya mempertahankan kondisi sumberdaya terdiri dari perlindungan terhadap hak-hak penangkapan, peningkatan stok sumberdaya, dan evaluasi terhadap kondisi sumberdaya;
- 3) Biaya distribusi sumberdaya terdiri dari distribusi hak penangkapan, dan biaya kelembagaan atau keikutsertaan.

#### 2.1.4 Hubungan Kelembagaan dengan Biaya Transaksi

Sebuah institusi muncul dan berkembang untuk meminimumkan biaya transaksi sehingga dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Biaya transaksi tersebut antara lain berwujud biaya atas informasi, negosiasi, pengawasan, koordinasi dan pelaksanaan kontrak. Jika biaya transaksi berada pada tingkat minimal, hak kepemilikan (*property rights*) tidak menjadi bagian penting dalam konsep umum efisiensi, karena hak kepemilikan dapat disesuaikan dan diubah secara sukarela guna mendorong kenaikan proses produksi. Menurut North dan

Wallis (1994) dalam Yustika (2008), dalam kerangka relasi antara perubahan teknis dan kelembagaan, maka biaya transaksi adalah ongkos untuk lahan, tenaga kerja, kapital dan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk mentransfer hak - hak kepemilikan (*property rights*) dari satu atau kelompok orang ke pihak yang lain.

Biaya transaksi muncul karena adanya transfer kepemilikan atau hak-hak kepemilikan. Jika diperluas dengan memasukkan biaya perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan, maka Mburu dan Birner menganggap biaya transaksi sebagai ongkos yang muncul dari penciptaan dan implementasi kesepakatan kelembagaan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan biaya transaksi adalah biaya atas lahan, tenaga kerja, kapital dan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk memindahkan (*transfer*) fisik menjadi output (Mburu, 2002 dalam Yustika, 2008). Menurut North (1990) dalam Yustika (2008), asumsi adanya informasi sempurna dan pertukaran tanpa biaya yang dibuat oleh model pasar persaingan sempurna tidaklah tepat. North melihat adanya biaya transaksi dalam pertukaran akibat adanya informasi yang tidak sempurna. North menyatakan bahwa biaya mencari informasi merupakan kunci dari biaya transaksi yang terdiri dari biaya untuk mengerjakan pengukuran kelengkapan – kelengkapan yang dipertukarkan dan ongkos – ongkos untuk melindungi hak kepemilikan dan mengakkan kesepakatan.

Besaran biaya transaksi juga bisa terjadi karena adanya penyimpangan dalam wujud:

- 1) Penyimpangan atas lemahnya jaminan hak kepemilikan
- 2) Penyimpangan pengukuran atas tugas yang kompleks dan prinsip yang beragam
- 3) Penyimpangan intertemporal, yang dapat berbentuk kontrak yang timpang, responsivitas waktu yang nyata, ketersembunyian informasi yang panjang dan penyalahgunaan strategis
- 4) Penyimpangan yang muncul karena kelemahan dalam kebijakan kelembagaan yang berhubungan dengan pembangunan dan reformasi ekonomi

5) Kelemahan integritas yang dirujuk oleh James Wilson (1989) sebagai *sovereign transactions*. Jadi akar dari permasalahan ini adalah informasi yang kurang sempurna.

#### 2.1.5 Ekonomi Perikanan

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menyebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Menurut Crutchfield (Tribawono, 2013), mengatakan bahwa usaha perikanan merupakan kegiatan ekonomi yang menempatkan prioritas motivasi ekonomi menjadi paling depan. Hal ini berarti bahwa adanya usaha perikanan akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan. Peningkatan kesejahteraan ekonomi nelayan seharusnya dapat dilakukan oleh pemerintah, karena kondisi aktual yang ada saat ini menunjukkan bahwa kemampuan para nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, mereka tidak dapat menutupi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan.

Sumberdaya perikanan termasuk kepada kelompok sumberdaya alam yang dapat diperbarui (*renewable resource*). Meskipun demikian dalam pemanfaatan sumber daya ini harus rasional sebagai usaha untuk menjaga keseimbangan produksi dan kelestarian sumberdaya (Yuli, 2011). Hal ini perlu adanya penegasan karena sumber daya perikanan merupakan sumber daya milik bersama (*common property resources*) dimana memunculkan adanya sistem *open access*, dalam artian secara bersama-sama semua orang dapat memanfaatkan sumberdaya ini dan tidak ada larangan bagi siapapun juga untuk memanfaatkannya. Secara garis besar, sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan melalui penangkapan ikan (perikanan tangkap) dan budidaya ikan. sehingga usaha perikanan merupakan semua kegiatan yang dilakukan secara perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk menyimpan, mendinginkan atau

mengawetkan ikan untuk tujuan komersil dan mendapatkan laba dari kegiatan yang dilakukan (Monintja, 2001).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perikanan tangkap adalah kegiatan ekonomi dalam bidang penangkapan atau pengumpulan binatang dan tanaman air, baik di laut maupun di perairan umum secara bebas. Kegiatan ini dibedakan dengan perikanan budidaya, dimana pada perikanan tangkap, binatang atau tanaman air masih belum merupakan milik seseorang sebelum binatang atau tanaman air tersebut ditangkap atau dikumpulkan sedangkan pada perikanan budidaya, komoditas tersebut telah merupakan milik seseorang atau kelompok yang melakukan budidaya tersebut (Keristina, 2011).

Perikanan tangkap sebagai sistem yang memiliki peran penting dalam penyediaan pangan, kesempatan kerja, perdagangan dan kesejahteraan serta rekreasi bagi sebagian penduduk Indonesia yang berorientasi pada jangka panjang (*sustainability management*). Tindakan manajemen perikanan tangkap adalah mekanisme untuk mengatur, mengendalikan, dan mempertahankan kondisi sumber daya ikan pada tingkat tertentu yang diinginkan. Salah satu kunci perikanan tangkap adalah status dan trend aspek sosial ekonomi dan aspek sumberdaya. Era baru sektor perikanan dalam konteks pembangunan yang ditujukan pada kelestarian perikanan dan ekonomi yang harus mengontrol pengembangan daerah (DKP, 2009).

Perikanan tangkap mempunyai peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan, menghasilkan protein hewani dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, meningkatkan ekspor, menyediakan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta mendukung pembangunan wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian dan fungsi lingkungan hidup (Achmad, 1999).

Melihat keadaan sumber daya perikanan Indonesia khususnya perikanan tangkap, telah mengalami *over fishing* pada beberapa daerah dan adanya tren penurunan dari produksi perikanan tangkap dunia, maka dalam pembangunan perikanan Indonesia kedepan lebih memfokuskan kepada peningkatan produksi di perikanan budidaya. Hal ini terlihat pada trilogi pembangunan perikanan Indonesia yaitu (1) kendalikan perikanan tangkap; (2) kembangkan perikanan budidaya; (3) tingkatkan mutu dan nilai tambah. Selain itu juga dibutuhkan kebijakan terintegrasi dan konvergen untuk membangun *ocean economic* dalam tiga pilar (a) *national ocean policy*, (b) *national ocean economic policy*, (c) *national ocean governance*. (KKP, 2010)

#### 2.1.6 Masyarakat Nelayan

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan wilayah laut (Kusnadi, 2009). Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kekuatan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor budaya ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dari kelompok masyarakat lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia (Kusnadi 2009). Menurut Mulyadi (2007), nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di kawasan pesisir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Secara sosiologis, ada perbedaan karakteristik mendasar antara masyarakat nelayan dengan masyarakat petani. Perbedaan ini terletak pada situasi ekologis yang harus mereka hadapi, dimana masyarakat petani dapat mengontrol situasi ekologis yang ada sedangkan nelayan dihadapkan pada situasi ekologis yang sulit dikontrol karena sifat dari sumber daya perikanan tangkap yang *open access*

sehingga nelayan harus berpindah-pindah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lautan dan ada resiko yang harus mereka hadapi dibandingkan dengan masyarakat petani. Dalam menghadapi situasi seperti ini, nelayan diharuskan untuk memiliki ketersediaan modal dan juga teknologi untuk dapat mengakses secara maksimal potensi lautan yang kaya akan sumberdaya.

Sebagian besar taraf hidup masyarakat nelayan masih rendah. Menurut Kusnadi (2003) ada dua sebab yang menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu sebab yang bersifat internal dan bersifat eksternal. Kedua sebab tersebut saling berinteraksi dan melengkapi. Sebab kemiskinan yang bersifat internal berkaitan erat dengan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Sebab-sebab internal ini mencakup masalah : (1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan, (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, (3) hubungan kerja (pemilik perahu nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh, (4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, (5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan (6) gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

Sebab kemiskinan yang bersifat eksternal berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan. Sebab-sebab eksternal ini mencakup masalah : (1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial, (2) sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara, (3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktik penangkapan dengan bahan kimia, pengrusakan terumbu karang, dan konservasi hutan bakau di kawasan pesisir, (4) penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, (5) penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan, (6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pascapanen, (7) terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan, (8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun, dan (9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia (Sipahelut, 2010).

Keterbatasan kepemilikan aset adalah ciri umum masyarakat nelayan yang miskin, hal ini tergambar dari kondisi rumah. Rumah nelayan terletak di pantai, di pinggir jalan kampung umumnya merupakan bangunan non permanen atau semi permanen, berdinding bambu, berlantai tanah, ventilasi rumah kurang baik sehingga sehari-hari bau anyir ikan menyengat dan meskipun siang hari, di dalam rumah cukup gelap, sementara juru mudi atau juragan jauh lebih baik berbentuk permanen (Siswanto 2008). Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daratan. Di beberapa kawasan pesisir yang relative berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja tinggi, solidaritas sosial yang kuat, serta terbuka terhadap perubahan dan interaksi sosial. Sekalipun demikian, masalah kemiskinan masih mendera sebgai masyarakat pesisir, sehingga fakta sosial ini terkesan ironi di tengah-tengah kekayaan sumber daya pesisir dan lautan, (Kusnadi 2009).

Menurut Wahyuningsih dkk (1977) masyarakat nelayan dapat dibagi menjadi tiga jika dilihat dari segi kepemilikan modal, yaitu:

- 1) Nelayan juragan, nelayan ini merupakan nelayan pemilik perahu dan alat penangkapan ikan yang mampu mengubah para nelayan pekerja sebagai pembantu usahanya menangkap ikan di laut. Nelayan ini memiliki tanah yang digarap pada musim paceklik. Nelayan juragan ada tiga macam yaitu nelayan juragan laut, nelayan juragan darat yang mengendalikan usahanya dari darat dan orang yang memiliki perahu, alat tangkap dan uang tetapi bukan nelayan asli atau yang disebut *tauke* (toke) atau cakong.
- 2) Nelayan pekerja atau nelayan buruh, nelayan yang tidak memiliki alat produksi dan modal, tetapi memiliki tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan di laut, nelayan ini disebut juga nelayan penggarap atau *sawi* (awak perahu nelayan). Juragan dalam hal ini berkewajiban menyediakan bahan makanan dan bahan baku untuk keperluan operasi penangkapan ikan, dan bahan makanan untuk dapur keluarga yang ditinggalkan selama berlayar. Hasil tangkapan di laut

dibagi menurut peraturan tertentu berbeda-beda antara juragan yang lainnya setelah dikurangi biaya produksi.

- 3) Nelayan pemilik, merupakan nelayan yang kurang mampu. Nelayan ini hanya mempunyai perahu kecil untuk keperluan dirinya sendiri dan alat penangkapan ikan sederhana, karena itu disebut juga nelayan perorangan.

Sastrawijaya (2002) mengatakan komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir. Ciri-ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut:

- 1) Dari segi mata pencaharian, nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka.
- 2) Dari segi cara hidup, komunitas nelayan adalah gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengarahannya tenaga kerja yang banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang sekitar pantai.
- 3) Dari segi ketrampilan, meski pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki ketrampilan yang sederhana. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara profesional.

Masyarakat nelayan juga terdiri dari 2 jenis, yaitu masyarakat nelayan tangkap dan masyarakat nelayan pengumpul. Masyarakat nelayan tangkap adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan kelompok modern dan nelayan tangkap tradisional. Kedua kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal atau peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapnya. Masyarakat nelayan pengumpul atau bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja di sekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan ikan melalui pelelangan maupun dari sisi ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat

atau dibawa ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan (Budiharsono, 2001).

#### 2.1.7 Teori Ekonomi Kesejahteraan

Di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat bersinergi dalam upaya untuk melaksanakan terselenggaranya kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam Edi Suharto (2005), istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Definisi ini dapat diartikan bahwa kesejahteraan ditempatkan sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Pemaknaan kesejahteraan menempatkan kesejahteraan sebagai arena atau wahana atau alat untuk mencapai tujuan pembangunan (Suharto, 2005).

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan (Arsyad, 1999). Pada dasarnya, kegiatan ekonomi lebih mementingkan untuk memaksimalkan keuntungan, disamping untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga menjadi sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan, apabila jika dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetisi dalam pasar juga bisa menimbulkan dampak negatif untuk terwujudnya ekonomi kesejahteraan.

Ekonomi kesejahteraan dalam bahasannya juga memikirkan prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terdapat dua jenis ekonomi kesejahteraan, yaitu ekonomi kesejahteraan konvensional dan syariah. Ekonomi kesejahteraan konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material saja, sedangkan ekonomi kesejahteraan syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh yaitu kesejahteraan material, spiritual dan moral. Ekonomi kesejahteraan mencoba untuk memaksimalkan tingkatan dari kesejahteraan sosial dengan pengujian kegiatan ekonomi dari individu yang ada dalam masyarakat. Kesejahteraan ekonomi mempunyai kaitan dengan kesejahteraan individu, sebagai lawan kelompok, komunitas atau masyarakat karena kesejahteraan berasumsi bahwa individu adalah unit dasar pengukuran.

Pada teori ekonomi kesejahteraan (konvensional) ada dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu pendekatan neo-klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru (modern). Pendekatan neo-klasik telah dikembangkan oleh Pigou, Bentham, Sidgwich, Edgeworth dan Marshall. Pendekatan neo-klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan cardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna (*diminishing marginal utility*). Pendekatan neo-klasik lebih lanjut berasumsi bahwa semua individu mempunyai fungsi nilai guna yang serupa, oleh karena itu hal tersebut mempunyai makna untuk membandingkan nilai guna individu dengan nilai guna milik orang lain. Pada pendekatan ekonomi kesejahteraan baru, menggunakan kriteria Pareto (*pareto criteria*) yang dikemukakan oleh ekonom berkebangsaan Italia Vilfredo Pareto, dimana kesejahteraan sosial mencapai situasi optimal jika salah satu pihak lebih beruntung (*better-off*) tanpa membuat pihak lain merugi (*worse-off*). Hal yang perlu diperhatikan dalam *pareto criteria* adalah *pareto improvement* dan *pareto efficient*. Kedua hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan ekonomi.

Dalam teori Pareto yang masuk ke dalam cabang ilmu ekonomi mikro menjelaskan bahwa ada tiga tingkatan kesejahteraan, yaitu *pareto optimal*, *pareto non optimal* dan *pareto superior*. Pareto optimal yaitu terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan

seseorang atau kelompok lain. *Pareto non optimal* yaitu terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. *Pareto superior* terjadi ketika peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Atikah Nurhayati (2013) yang berjudul Analisis Potensi Lestari Perikanan Tangkap di Kawasan Pangandaran dengan menggunakan model Schafer dengan teknik CYP (Clark, Yoshimoto, Pooley). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi lestari perikanan tangkap di kawasan Pangandaran Provinsi Jawa Barat, karena selama 11 tahun terakhir perikanan tangkap di kawasan Pangandaran mengalami penurunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tangkapan optimal berdasarkan hasil dari berbagai rezim pengelolaan perikanan yaitu : *maximum economic yield (MEY)* sebesar 1.560,78 ton, *maximum sustainable yield (MSY)* 1.567 ton. Kondisi perikanan tangkap di kawasan Pangandaran Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami penurunan hasil produksi, yang harus diantisipasi dengan melakukan perbaikan habitat ikan, konservasi hutan mangrove, peningkatan pemahaman dan kesadaran nelayan untuk menjaga keseimbangan ekosistem pantai.

Penelitian yang dilakukan Akhmad Fauzi dan Suzy Anna (2002) yang berjudul Evaluasi Status Keberlanjutan Pembangunan Perikanan: Aplikasi Pendekatan Rappfish (Studi Kasus Perairan Pesisir DKI Jakarta). Penelitian ini bertujuan untuk menilai status keberlanjutan sumberdaya perikanan baik dari aspek ekonomi, sosial dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek ekonomi misalnya tiga atribut yang dominan yang cukup berpengaruh dalam pembangunan perikanan yang berkelanjutan di pesisir Jakarta adalah *marketable right*, *sector employment* dan *other income*. Dengan demikian kebijakan yang menyangkut aspek *marketable right* seperti pengaturan hasil tangkap, sistem bagi hasil haruslah mendapat perhatian penentu kebijakan. Selain itu kebijakan juga harus diarahkan kepada kebijakan yang mampu menciptakan

lapangan kerja di luar sektor perikanan serta peningkatan pekerjaan di sektor formal perikanan itu sendiri bagi masyarakat pesisir di Jakarta.

Dari aspek sosial, tiga atribut yakni tingkat pendidikan, pengetahuan ingkungan dan *fishing income* hampir secara bersamaan mempengaruhi aspek keberlanjutan dengan derajat yang sama. Artinya kebijakan perikanan yang menyangkut aspek sosial, dalam kasus ini hendaknya ditekankan pada ketiga aspek di atas dengan tidak mengesampingkan aspek lainnya. Dari aspek teknologi terlihat bahwa atribut *selective gear* sangat sensitif, bahkan mendominasi seluruh atribut lainnya dalam dimensi keberlanjutan. Dengan demikian, kebijakan yang menyangkut aspek teknologi hendaknya diarahkan untuk memperbaiki tingkat selektivitas dari alat tangkap, sehingga *by catch* berkurang dan memberikan nilai tangkap yang tinggi. Hal ini terkait pula dengan atribut ekologi, dimana atribut “*range collapse*” (penurunan kisaran spesies yang ditangkap secara geografis) terlihat mempunyai pengaruh tinggi.

Penelitian Dedi Putra Wahyudi (2014) yang berjudul Analisis Persepsi Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala Kecil di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat dengan menggunakan *Path Analysis* menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa aspek ekonomi memiliki pengaruh terbesar diantara ketiga aspek lainnya. Berdasarkan analisis keempat aspek keberlanjutan dapat diketahui permasalahan yang terjadi di PPI Cisolok yaitu penentuan harga hasil tangkapan yang dikendalikan oleh pihak swasta, nelayan kurangnya pelibatan nelayan terhadap proses pengambilan kebijakan, kondisi lingkungan yang sudah tidak dapat menampung laju pertumbuhan *effort* nelayan dan kurangnya pendataan terhadap proses berjalannya perikanan tangkap skala kecil. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya pemerintah mengeluarkan aturan mengenai penentuan harga hasil tangkapan, melibatkan nelayan dalam proses pengambilan kebijakan dan lebih mengawasi proses berjalannya perikanan tangkap skala kecil di PPI Cisolok terutama dalam hal pembatasan eksploitasi dan pendataan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Akhmad Fauzi dan Suzy Anna 2002	Evaluasi Status Keberlanjutan Pembangunan Perikanan: Aplikasi Pendekatan Rapfish (Studi Kasus Perairan Pesisir DKI Jakarta)	Rapfish ( <i>Rapid Appraisal for Fisheries</i> )	Dari aspek ekonomi misalnya tiga atribut yang dominan yang cukup berpengaruh dalam pembangunan perikanan yang berkelanjutan di pesisir Jakarta adalah <i>marketable right</i> , <i>sector employment</i> dan <i>other income</i> . Dari aspek sosial, tiga atribut yakni tingkat pendidikan, pengetahuan ingkungan dan <i>fishing income</i> hampir secara bersamaan mempengaruhi aspek keberlanjutan dengan derajat yang sama. Artinya kebijakan perikanan yang menyangkut aspek sosial, dalam kasus ini hendaknya ditekankan pada ketiga aspek di atas dengan tidak mengesampingkan aspek lainnya. Dari aspek teknologi terlihat bahwa atribut <i>selective gear</i> sangat sensitif, bahkan mendominasi seluruh atribut lainnya dalam dimensi keberlanjutan.
2	Subhan Abror Alhidayat 2002	Kajian Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan	Analisis Multidimensional Scalling, Analisis Ekonomi dan Analisis Optimasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan sumberdaya udang kondisinya relatif paling buruk diantara komoditas ikan yang dianalisis. Status kondisi yang relatif terbaik adalah usaha penangkapan rajungan. Penurunan sumberdaya perikanan tangkap tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekologi, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi dan juga teknologi yang digunakan.
3	Suhana 2008	Analisis Ekonomi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Ikan Teluk Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi	Analisis Aktor Pengelolaan Sumberdaya ikan, Analisis Tata Kelola Sumberdaya ikan,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang harus dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan terdiri dari unsur pemerintah masyarakat, akademisi dan aparat keamanan.

			Analisis Biaya Transaksi, Analisis <i>game theory</i> dan Analisis Keefektifan Biaya	
4	Onolawe Prima Sibagariang, Fauziyah dan Fitri Agustriani, 2011	Analisis Potensi Lestari Sumberdaya Perikanan Tuna <i>Longline</i> di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah	Metode statistika dan wawancara	Status pemanfaatan sumber daya ikan tuna di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah dalam kondisi tangkap lebih ( <i>overfishing</i> ) sehingga pengembangan perikanan tuna <i>longline</i> di Cilacap dihimbau untuk tidak melakukan penambahan unit penangkapan lagi.
5	Mustaruddin, 2012	Pengembangan Perikanan Tangkap yang Bersinergi dengan Aspek Lingkungan dan Sosial Ekonomi : Studi Kasus di Perairan Kabupaten Banyuwangi	Analisis fisika-kimia perairan, Analisis SWOT, AHP ( <i>Analytical hierarchy process</i> )	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penggiatan sosialisasi JTB dan perlindungan ruaya ikan merupakan strategi prioritas untuk sinergi pengembangan perikanan tangkap dengan aspek lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.
6	Lukman Adam, 2012	Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara)	Deskriptif Kualitatif	Kondisi sumber daya perikanan yang semakin menurun menyebabkan perlunya pengelolaan perikanan supaya tetap lestari dan memberikan hasil yang berkelanjutan. Strategi dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan adalah adanya integrasi antara lingkungan, ekonomi dan sosial yang berpihak terhadap nelayan.
7	Atikah Nurhayati 2013	Analisis Potensi Lestari Perikanan Tangkap di Kawasan Pangandaran	Metode Survey, Model Fox dan bio-ekonomi, Model Schafer dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perikanan tangkap di kawasan pangandaran Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami penurunan hasil produksi, yang harus diantisipasi dengan melakukakn

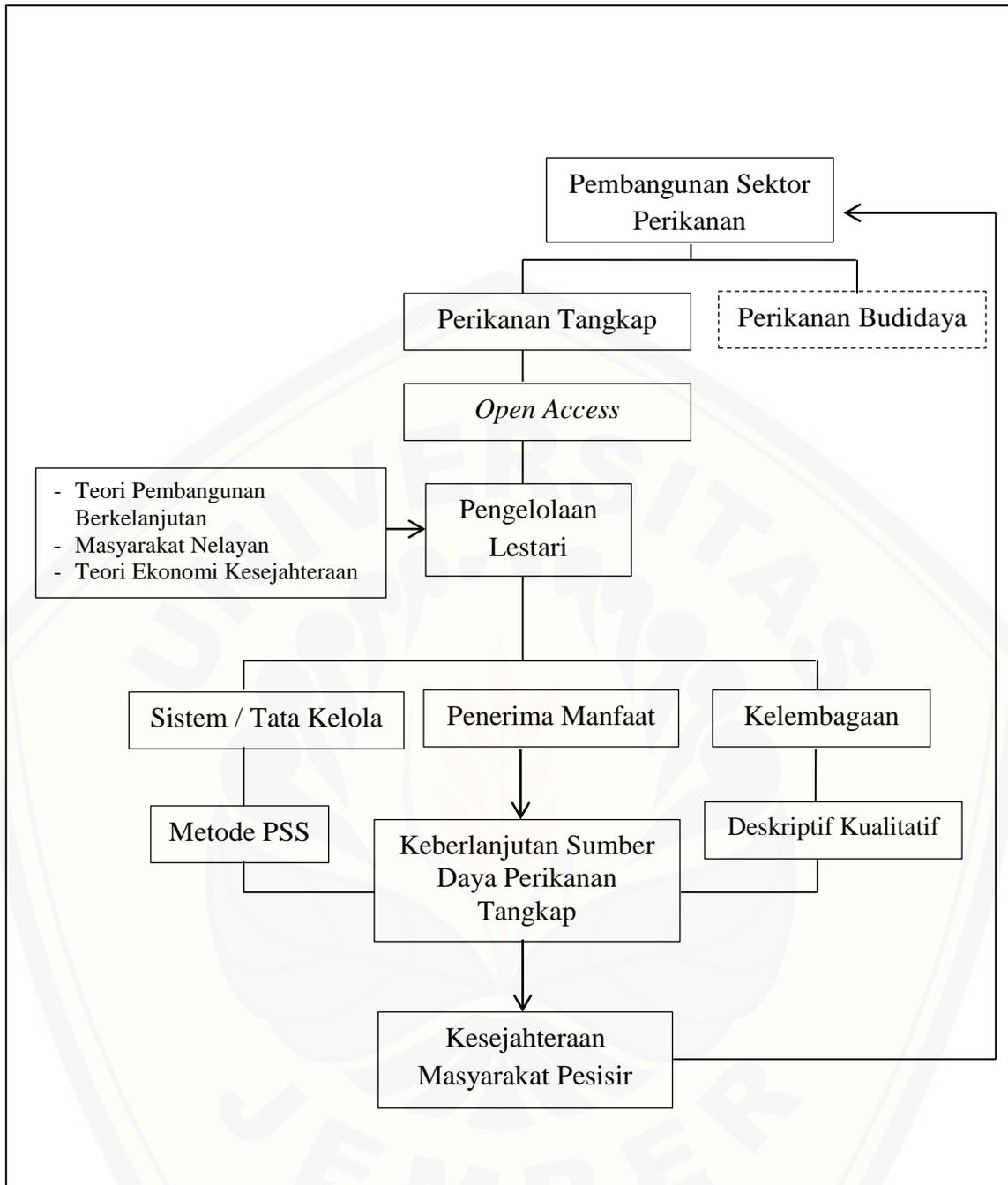
			Teknik CPY (Clark, Yoshimoto, Pooly)	perbaikan habitat ikan, konservasi hutan mangrove, peningkatan pemahaman dan kesadaran nelayan untuk menjaga keseimbangan ekosistem pantai.
8	Hidayat 2013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan	Analisis Deskriptif Kualitatif	Program-program pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat nelayan hendaknya dilakukan secara partisipatif, terintegrasi, sinergi dan sistemik yang melibatkan segenap pemangku otoritas bidang kelautan dan perikanan termasuk kelembagaan milik masyarakat nelayan. Peningkatan kapasitas milik masyarakat nelayan dilakukan pada aras individual, organisasi dan sistem regulasi/kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
9	Dedi Putra Wahyudi, 2014	Analisis Persepsi Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala Kecil di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat	<i>Path Analysis</i>	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa aspek ekonomi memiliki pengaruh terbesar diantara ketiga aspek lainnya. Berdasarkan analisis keempat aspek keberlanjutan dapat diketahui permasalahan yang terjadi di PPI Cisolok yaitu penentuan harga hasil tangkapan yang dikendalikan oleh pihak swasta, nelayan kurangnya pelibatan nelayan terhadap proses pengambilan kebijakan, kondisi lingkungan yang sudah tidak dapat menampung laju pertumbuhan <i>effort</i> nelayan dan kurangnya pendataan terhadap proses berjalannya perikanan tangkap skala kecil. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya pemerintah mengeluarkan aturan mengenai penentuan harga hasil tangkapan, melibatkan nelayan dalam proses pengambilan kebijakan dan lebih mengawasi proses berjalannya perikanan tangkap skala kecil di PPI Cisolok terutama dalam hal pembatasan eksploitasi dan pendataan.

10	Ratna Purwaningsih dan Haryo Santosa, 2015	Pengembangan Metode Penilaian Keberlanjutan ( <i>Sustainability Assesment</i> ) Klaster Industri Perikanan	Metode Penilaian Keberlanjutan Klaster	Penelusuran pustaka menghasilkan indikator dan parameternya untuk empat dimensi pembangunan berkelanjutan meliputi ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Pihak penilaian meliputi nelayan, industri pengolahan, pemerintah sebagai pemegang otoritas. Metode yang dapat digunakan untuk pengolahan data dan pembentukan skala adalah metode multi atribut seperti teknometrik, Rappfish dan indeks komposit.
----	--	--	--	---

### 2.3 Kerangka Konseptual

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kondisi ini membuat potensi perikanan di Indonesia sangatlah besar khususnya di bidang perikanan tangkap. Sumbangan sektor perikanan terhadap perekonomian di Indonesia juga tidaklah sedikit, apalagi setelah adanya kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti secara tegas kapal-kapal asing yang mencari ikan secara ilegal di perairan Indonesia yang selama ini merisaukan para nelayan di Indonesia, karena memang masalah kelautan yang sering dihadapi oleh banyak nelayan di berbagai negara salah satunya di Indonesia yaitu sumber daya perikanan tangkap yang bersifat *open access*. Semua orang berhak untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di laut. Dampak lebih lanjut dari adanya sumber daya yang bersifat *open access* yaitu terjadinya pemanfaatan berlebih atau *overfishing* yang berimplikasi pada ketidakberlanjutan sumberdaya perikanan.

Potensi lestari (*maximum sustainable yield/MSY*) perikanan tangkap di Indonesia sangatlah besar, namun pemanfaatan yang dilakukan selama ini masih belum maksimal. Terjadi ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya perikanan seperti di Laut Jawa yang telah terjadi *overfishing* dan di Indonesia bagian Timur pemanfaatannya justru masih dibawah potensi lestari. Hal ini berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat pesisir yang sebagian besar masih di bawah rata-rata. Diperlukan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang berkelanjutan melalui perbaikan sistem tata kelola dan sistem kelembagaan yang ada agar potensi lestari sumber daya laut tetap terjaga dengan memperhatikan beberapa aspek seperti aspek sosial, ekologi dan ekonomi. Hal ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan di Kecamatan Muncar, yang memerlukan perbaikan sistem tata kelola dan kelembagaan lokal yang ada.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

### BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2005). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi data primer, analisis dan interpretasi data dari hasil yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis serta rekomendasi dari hasil temuan, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diteliti.

Metode deskriptif digunakan untuk mengkaji sesuatu seperti apa adanya (variabel tunggal) atau pola hubungan (korelasional) antara dua variabel atau lebih (Prasetyo, 2006). Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1993).

#### 3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive method*). Dari banyaknya kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuwangi, penelitian ini memilih Kecamatan Muncar karena daerah ini menjadi salah satu sentra perikanan terbesar di Jawa Timur dan terdapat banyak sekali aktivitas yang berkaitan dengan subsektor perikanan di kawasan ini terutama perikanan tangkap. Disamping itu dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan Muncar, peneliti memilih Desa Kedungrejo sebagai fokus daerah penelitian karena banyak nelayan yang berasal dari desa tersebut. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu dari bulan Januari hingga Juni 2017.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap para pihak yang terkait dengan sub sektor perikanan tangkap seperti nelayan tradisional dan para juragan (juragan laut dan darat) dengan melakukan wawancara secara mendalam dan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen atau publikasi dari instansi terkait.

#### 1) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan pemberian kuesioner. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key-informan*, dan dari *key-informan* inilah akan berkembang sesuai petunjuknya (Subagyo, 2006). Teknik ini ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu dua orang, tetapi karena dengan dua orang tersebut belum dirasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang memiliki pengetahuan yang lebih untuk melengkapi data, begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Dengan teknik *snowball sampling* ini dipilih nelayan juragan yang berjumlah satu orang, yang akan menjadi *key informan* untuk selanjutnya memberikan petunjuk siapa informan dari kalangan nelayan buruh yang berkompeten memberikan data dan memahami betul mengenai kondisi perikanan di Kecamatan Muncar.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari pengumpulan data yang menunjang data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2009 sampai Maret 2017, buku-buku dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian.

### 3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah nelayan yang ada di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

### 3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010). Adapun dalam penelitian ini, penentuan responden dilakukan secara *purposive sampling* dengan penggalan data menggunakan panduan kuesioner. Dengan metode ini responden dianggap mempunyai kemampuan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan dapat memahami permasalahan yang ada. Menurut Singarimbun dan Sofian Effendi (1995), metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu berdasarkan tujuan penelitiannya. Responden yang dipilih dalam penelitian ini yaitu para nelayan yang ada di Desa Kedungrejo dimana sebagian besar nelayan tinggal di kawasan ini.

Menurut Arikunto (2010), *purposive sampling* dalam pengambilan subyeknya didasarkan atas tujuan tertentu (sesuai kebutuhan penelitian), tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Pengambilan sampel didasarkan atas ciri dan karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi, untuk nelayan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nelayan buruh;
- b. Subyek yang diambil dalam sampel merupakan yang paling banyak mengandung ciri-ciri pada populasi;
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat.

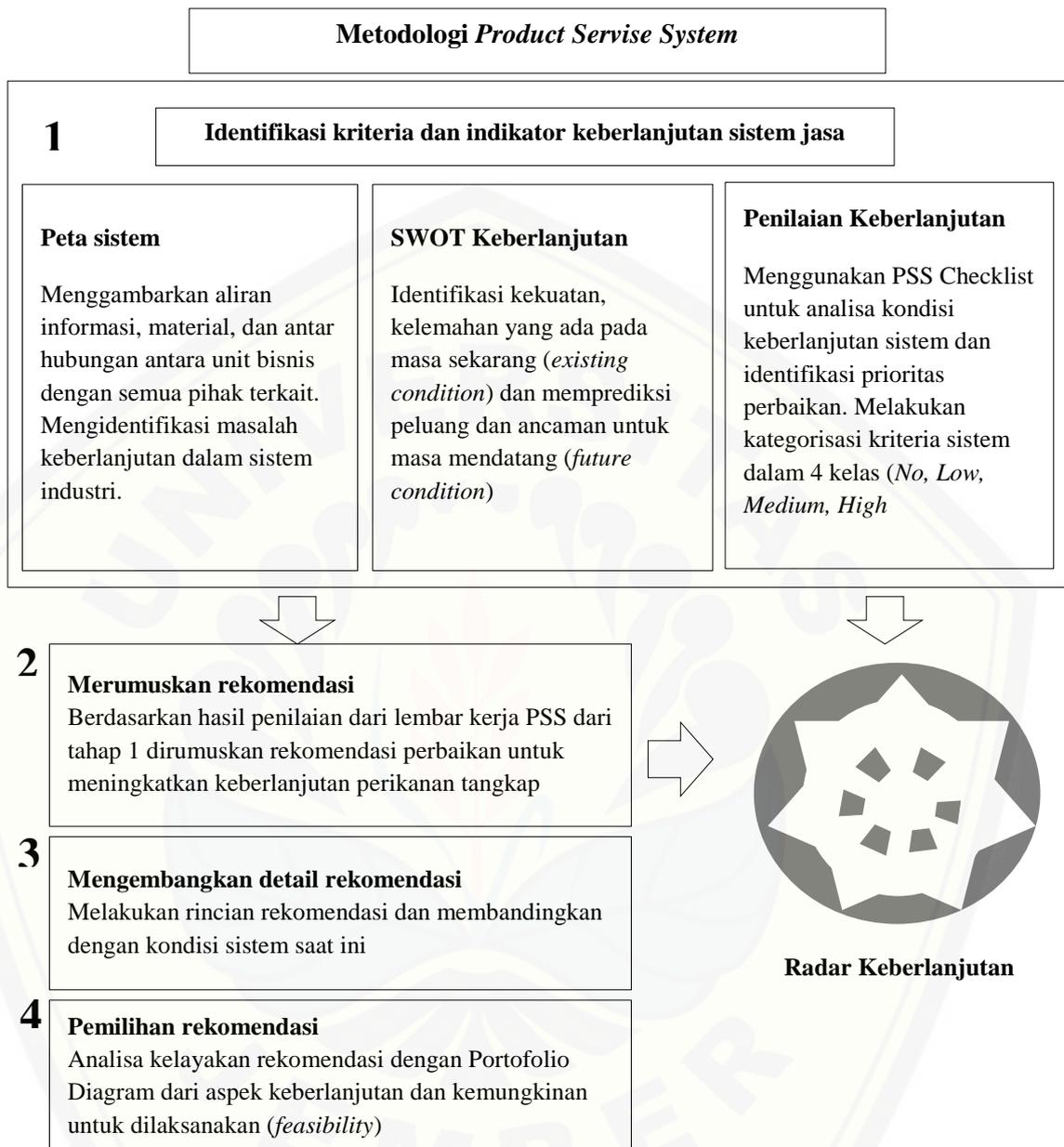
### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

- 1) Studi kepustakaan, bertujuan untuk merumuskan konsep dan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, melalui penelaahan berbagai literatur, buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, dokumen yang berkaitan dengan penilaian keberlanjutan subsektor perikanan tangkap sebagai bagian dari upaya pelestarian perikanan tangkap di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
- 2) Observasi atau penelitian lapangan, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. Teknik observasi ini bertujuan untuk mengamati suatu fenomena sosial sekaligus melakukan pengumpulan data serta mengamati keseluruhan gejala-gejala atau fenomena yang terjadi. Ada beberapa variabel penelitian yang berkenaan dengan observasi ini, yakni variabel lingkungan, ekonomi dan sosial.
- 3) Kuesioner, yakni berupa daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang harus dijawab dan diisi oleh responden sebagai sampel terpilih. Responden dalam penelitian ini yakni segala pihak yang berkaitan dengan perikanan tangkap seperti nelayan, pemasok ikan, pedagang ikan, pabrik pengolahan ikan, dan juragan (darat dan laut).
- 4) Wawancara, bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan secara obyektif. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap nelayan dan para juragan (darat dan laut).

### **3.5 Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui sistem kelembagaan yang menunjang pengembangan perekonomian nelayan baik lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat. Peran kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Muncar, ditinjau dari segi peran dari masing-masing kelembagaan yang ada di Kecamatan Muncar. Peran masing-masing kelembagaan tersebut baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan dijabarkan secara deskriptif kualitatif.



Gambar 3.1. Tahapan dalam PSS (UNEP dan DELFT University of Technology), 2009

Aktivitas dalam setiap tahapan PSS digambarkan secara umum seperti pada Gambar 3.1 diatas. Metode penilaian keberlanjutan dan perumusan rekomendasi dengan menggunakan metode PSS, dilakukan dengan serangkaian tahapan yang dikembangkan oleh UNEP dan DELFT *University of Technology*. Dalam penelitian ini, metode PSS yang digunakan terdiri dari 4 tahapan yaitu (1) Mengidentifikasi dimensi keberlanjutan sistem, (2) Merumuskan dan memilih

alternatif rekomendasi, (3) Melakukan penilaian terhadap detail rekomendasi, (4) Melakukan evaluasi pada rekomendasi untuk memilih yang terbaik.

Pada tahap pertama PSS adalah mengidentifikasi dimensi keberlanjutan sistem. Pada tahap ini dilakukan pengenalan terhadap sistem perikanan tangkap yang dipelajari dengan memperhatikan aspek internal dan eksternal dengan membuat peta sistem, membuat diagram SWOT keberlanjutan (identifikasi *strength* dan *weakness* untuk kondisi sekarang serta identifikasi *opportunity* dan *threat* untuk masa mendatang), dan penilaian keberlanjutan dengan menggunakan lembar kerja PSS. Jadi, tahap pertama ini terdiri dari tiga aktivitas berikut ini :

1. Menggambar peta sistem berfungsi untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam industri tersebut, serta mengidentifikasi aliran material serta informasi didalamnya,
2. Membuat SWOT keberlanjutan berfungsi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis SWOT ini sendiri mencakup lima aspek, yaitu lingkungan, sosial budaya, ekonomi, teknologi dan regulasi,
3. Menilai industri dengan *checklist* untuk menganalisis kriteria-kriteria dalam sistem yang belum memenuhi aspek keberlanjutan dengan 3 dimensi dan setiap dimensi terdiri dari 6 kriteria.

Tahap kedua dalam PSS memilih rekomendasi yang dilakukan dengan bantuan lembar kerja (*worksheet*) PSS dan portofolio diagram untuk penilaian kelayakan rekomendasi. Lembar kerja PSS berisi pilihan untuk mengarahkan rekomendasi. Berikutnya adalah membuat Diagram Kelayakan Rekomendasi yang digunakan untuk melihat apakah rekomendasi yang ditawarkan layak dan mengandung aspek keberlanjutan untuk sistem atau tidak. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain kemungkinan untuk melakukan perubahan pada penggunaan alat tangkap, pengurangan penggunaan sumber daya, dan pengelolaan limbah.

Tahap ketiga adalah mengembangkan detail rekomendasi terpilih dengan mengidentifikasi prioritas kriteria rekomendasi dengan nilai H = Tinggi, M = Sedang, L = Rendah dan N = Tidak ada. Identifikasi dilakukan dengan bantuan lembar kerja PSS dimana responden mengisi jawaban “Ya” dan “Tidak”, jawaban

“Ya” memiliki nilai 1 dan jawaban “Tidak” memiliki nilai 0. Kriteria dengan prioritas tertinggi dan menengah harus lebih dipertimbangkan.

Tahap keempat adalah melakukan evaluasi dan memilih rekomendasi terpilih. Tahap ini dilakukan dengan membuat portofolio diagram dan radar PSS yang berfungsi untuk membandingkan kondisi jika rekomendasi tersebut diterapkan pada sistem saat ini. Langkah untuk membuat portofolio diagram yaitu: (i) posisikan semua rekomendasi dalam matriks, (ii) lakukan perangkuman semua hasil rekomendasi ke dalam diagram portofolio PSS, (iii) semua rekomendasi dibandingkan satu sama lain dan dengan mempertimbangkan semua rekomendasi sebelumnya yang telah dilakukan, (iv) posisikan rekomendasi dalam diagram menurut potensi tertinggi sampai terendah dari aspek keberlanjutan dan kelayakan implementasi (Purwaningsih, 2016). Hasil dari evaluasi rekomendasi ini kemudian dipetakan dalam radar keberlanjutan untuk setiap dimensi.

### **3.5.1 Peta Sistem**

Peta sistem berfungsi untuk mengidentifikasi aktivitas serta alur material yang ada pada sistem, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam aktivitas subsektor perikanan tangkap, misalnya nelayan, pedagang ikan, pemilik industri atau perusahaan pengolahan ikan dan juragan.

### **3.5.2 SWOT Berkelanjutan**

Tahapan kedua yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*) berapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dalam pembangunan berkelanjutan subsektor perikanan tangkap di Kecamatan Muncar. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) yang ada dan kemudian diimplementasikan dalam matriks SWOT untuk mendapatkan strategi terbaik.

Tabel 3.1. Matriks SWOT Berkelanjutan

Kriteria	Kondisi saat ini		Kondisi mendatang	
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1. Dimensi Ekonomi 1.1 1.2 1.3				
2. Dimensi Lingkungan 2.1 2.2 2.3				
3. Dimensi Sosial 3.1 3.2 3.3				

### 3.5.3 Penilaian Keberlanjutan

Penilaian keberlanjutan ini menggunakan PSS Checklist, digunakan untuk menganalisa kondisi keberlanjutan yang ada pada sistem dan untuk mengidentifikasi prioritas perbaikan sistem. Setelah dilakukan analisa, setiap kriteria sistem dikategorisasikan ke dalam 4 kelas, yaitu *No* (tidak ada), *Low* (rendah), *Medium* (sedang) dan *High* (tinggi). Perumusan rekomendasi dilakukan berdasarkan tingkatan kategorisasi, dimana hanya yang bernilai *Medium* dan *High* yang memerlukan perumusan rekomendasi karena dianggap memiliki peran penting bagi keberlanjutan perikanan tangkap dan nilai *No* dan *Low* dianggap tidak memerlukan rekomendasi.

### 3.6 Definisi Operasional

- 1) Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau dan badan air lainnya) yang memiliki sifat *open access* dan tidak dapat dikendalikan secara sengaja oleh manusia.

Perikanan tangkap sebagian besar dilakukan di laut, berbeda dengan perikanan budidaya yang dioperasikan di daratan menggunakan kolam air atau tangki yang membuat organisme air yang dipelihara tidak lepas ke alam liar. Di dalam perikanan tangkap muncul masalah yang mengemuka yaitu penangkapan ikan berlebih (*overfishing*) dan polusi laut (penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan).

- 2) Pengelolaan lestari adalah sistem pengelolaan perikanan tangkap yang menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya laut dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang.
- 3) Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat tanpa menghalangi generasi masa depan atas haknya untuk memanfaatkan sumberdaya pula.
- 4) Masyarakat nelayan adalah kelompok manusia yang tinggal dan hidup di kawasan pesisir dengan mata pencaharian pokok mencari ikan di laut dan menggantungkan hidupnya atas hasil laut.

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Sumberdaya perikanan tangkap di Kecamatan Muncar memiliki potensi yang sangat besar dalam menunjang kehidupan masyarakat kawasan pesisir Muncar khususnya masyarakat nelayan. Namun kondisi aktual saat ini, volume produksi perikanan tangkap di Kecamatan Muncar semakin mengalami penurunan. Hal ini berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat nelayan khususnya nelayan yang berstatus sebagai nelayan buruh. Pembangunan berkelanjutan dalam subsektor perikanan tangkap diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan tanpa mengabaikan aspek ekonomi, ekologi (lingkungan) dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Berdasarkan analisis deskriptif menunjukkan belum ada lembaga atau institusi yang dapat menjadi wadah bagi kebutuhan masyarakat nelayan di Kecamatan Muncar. Sistem ketergantungan penuh antara nelayan buruh dengan juragan merupakan sebuah tradisi dan budaya bagi masyarakat nelayan.
2. Pembangunan sumberdaya perikanan tangkap di Kecamatan Muncar belum sampai pada tahap berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dari hasil penghitungan penilaian keberlanjutan dengan menggunakan lembar kerja PSS (*PSS worksheet*). Hasil pengukuran tingkat keberlanjutan sumberdaya perikanan tangkap Kecamatan Muncar menunjukkan nilai rata-rata yang masih rendah. Dari setiap dimensi (ekonomi, sosial dan lingkungan) terdapat beberapa kriteria yang memiliki hasil nilai *medium* (M) dan *high* (H). Ini berarti bahwa dalam setiap dimensi membutuhkan alternatif rekomendasi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan perikanan tangkap. (a) Dari dimensi ekonomi, menurunnya kuantitas jumlah tangkapan menjadi prioritas dalam perumusan rekomendasi. Para penerima manfaat dari sumberdaya perikanan tangkap harusnya memberikan sebuah kompensasi berupa tindakan konservasi untuk menjaga ekosistem perikanan tangkap. Selain itu peran pemerintah juga diperlukan sebagai pihak yang memiliki peran penting terkait dengan

kebijakan sumberdaya perikanan tangkap. (b) Pada dimensi lingkungan hanya terdapat satu prioritas pengembangan rekomendasi, yaitu pembuatan IPAL dan penggunaannya yang sesuai standar. Pengelolaan limbah secara lebih baik dapat meminimalisir pencemaran sehingga tidak mempengaruhi keseimbangan ekosistem sumberdaya perikanan. (c) Dimensi sosial, perbaikan sistem kelembagaan merupakan pilihan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem tata kelola sumberdaya perikanan tangkap di Kecamatan Muncar guna menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pada akhirnya, perbaikan dalam setiap aspek pendukung pembangunan keberlanjutan perikanan dapat menjaga kelestarian sumberdaya perikanan sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap dapat dilakukan secara optimal tanpa mengesampingkan keberlanjutan dari segi ekonomi, lingkungan maupun sosial.

## 5.2 Saran

Dalam menjaga kelestarian perikanan tangkap, pada umumnya diperlukan sinergi dari seluruh lapisan masyarakat dan juga pemerintah dalam pengelolaannya. Namun secara khusus ada beberapa saran dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap di Kecamatan Muncar secara berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya nelayan buruh.

1. Menghidupkan kembali koperasi nelayan di Kecamatan Muncar sebagai wadah untuk menampung kepentingan masyarakat nelayan menjadi hal penting yang dapat dilakukan guna menciptakan kemandirian masyarakat nelayan buruh.
2. Kegiatan konservasi dan rehabilitasi perairan Selat Bali dapat memperbaiki kualitas perairan Selat Bali itu sendiri, selain itu perbaikan sistem penangkapan serta penggunaan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan dapat ikut menjaga kelestarian sumberdaya perikanan tangkap. Perbaikan sistem pembuangan limbah perlu dilakukan untuk meminimalisir pencemaran

limbah di perairan Selat Bali akibat aktivitas yang dilakukan oleh industri. Perbaikan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan tingkat pendidikan juga tidak kalah penting guna menciptakan masyarakat nelayan yang lebih berpendidikan serta memiliki pengetahuan yang tinggi akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut dan juga pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap secara berkelanjutan yang bukan hanya bersifat eksploitasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah *et al.* 2008. *An Empirical Study of Knowledge Management System Implementation in Public Higher Learning Institution*. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol.8 No.1 January 2008: P 281-290.
- Achmad, H. 1999. *Strategi Mengelola Sumberdaya Hayati Laut Indonesia*. Dalam Seminar Reformasi Format Pengelolaan Sumberdaya Hayati Laut Yang Berkelanjutan dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan 8 Hal.
- Agustine Adhinda Dewi, Irwan Noor dan Abdullah Said. 2012. *Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi)*. Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Vol 2, No.2. Hal 276-280.
- Alhidayat, Subhan Abror. 2002. *Kajian Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan*. Tesis. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Mikro*. Jakarta:Gemapres. 23.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Barani, Husni Mangga. 2004. *Pemikiran Percepatan Pembangunan Perikanan Tagkap Melalui Gerakan Nasional*.
- Budiharsono, Sugeng. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta:Pradnya Pramita.
- Daily GC. 1997. *Nature's services: societal dependence on natural ecosystems*. Washington, DC: Island Press.
- Djogo T, Sunaryo D, Suharjito, Sirait M. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforesti*. Bahan Ajaran Agroforesti & World Agroforestry Centre (ICRAF) Southest Asia. Bogor.
- Evi. 2001. *Usaha Perikanan di Indonesia*. Jakarta : PT Mutiara Sumber Widya.
- Fauzi A dan S Anna. 2002. *Evaluasi Status Keberlanjutan Pembangunan Perikanan: Aplikasi Pendekatan Rapfish (Studi Kasus Perairan Pesisir DKI Jakarta)*. Jurnal Pesisir dan Lautan Indonesia Vol 4 (2) pp:36-49.

- Freddy Rangkuti. 2000. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, h.31.
- Furubotn EG and Rudolf Richter. 2000. *Institutional and Economic Theory : The Contribution of the New Institutional Economic*. The University of Michigan Press.
- Goodland, R. 1995. *Ecological Sustainability and Integrity : Concepts and Approaches, Environmental Science and Technology Library*. Kluwer Academic Publisher. Dordrecht, The Netherlands.
- Hidayat, 2013. *Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan*. Jurnal Sejarah CITRA LEKHA, Vol XVII No. 1 Februari 2013: 43-58. Universitas Negeri Medan.
- Israel, Arturo. 1992. *Pengembangan Kelembagaan, Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia*. LP3ES. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2010. *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-2014*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Keristina. 2011. *Peranan Dan Dampak Subsektor Perikanan Tangkap Terhadap Ekonomi Wilayah Kabupaten Cirebon*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Kusnadi, 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara .136 hlm.
- Kusnadi, 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember. 152 hlm.
- Le Ry JM. 2007. Cornouaille Fishing Harbours in France. Di dalam: Lubis E dan AB Pane, editor. *International Seminar Proceeding Dynamic Revitalisation of Java Fishing Port and Capture Fisheries on Promoting The Indonesian Fishery Development*; Auditorium Rektorat Institut Pertanian Bogor, 6-7 Juni 2005. Bogor: IPB Press. Hal 83.
- Luhulima, C.P.F. 1998. *Politik Pembangunan Manusia dan Lingkungan : Dimensi Manusia Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Editor C.M Firdausy. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Lukman Adam. 2012. *Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara)*. Jurnal Perikanan dan Kelautan. 2 (2) : 115-126

- Mariani Nevi, Hasdi Aimon, Sri Ulfa Sentosa. 2014. *Analisis Produksi dan Efisiensi Ikan Laut Nelayan Bagan Mesin di Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal Kajian Ekonomi Vo.iii No 5. Juli 2014.
- Monintja, D. 2001. Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Dalam Bidang Perikanan Tangkap. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir, Institut Pertanian Bogor.
- Mulyadi. 2007. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyana, Ridwan. 2007. *Pengelolaan Perikanan dan Teori Perizinan*. Subdit Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat PUP, Dirjen Perikanan Tangkap. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Mustaruddin. 2012. *Perkembangan Perikanan Tangkap Yang Bersinergi Dengan Aspek Lingkungan dan Sosial Ekonomi: Studi Kasus Di Perairan Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan. 1(1): 17-29.
- Nabunome, Welhemus. 2007. *Model Analisis Bioekonomi dan Pengelolaan Sumberdaya Ikan Demersal (Studi Empiris Kota Tegal, Jawa Tengah)*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Nikijuluw. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Kerjasama P3R dengan PT Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Nikijuluw. 2005. *Politik Ekonomi Perikanan Bagaimana dan Kemana Bisnis Perikanan*. Jakarta:Feraco.
- Nurhayati, Atikah. 2013. *Analisis Potensi Lestari Perikanan Tangkap di Kawasan Pangandaran*. Jurnal Akuatika Vol.IV No.2:195—209. Universitas Padjajaran.
- Prasetya, Irawan. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial . Jakarta: DIA FISIP UI, 2006. h. 101.
- Pratama, M.Agung., dkk. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Produksi Unit Penangkapan Purse Seine (Gardan) di Fishing Base PPP Muncar*. Jurnal Saintek Perikanan Vol.II No.2:120-128, Februari 2016.
- Purwaningsih, Ratna dan Haryo Santosa. 2015. *Pengembangan Metode Penilaian Keberlanjutan (Sustainability Assessment) Klaster Industri Perikanan*. Prosiding SNST ke-6 Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Putra, Dody Yuli. 2011. *Peran Sektor Perikanan Dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis Input-Output*. Universitas Andalas.

- Sastrawijaya, Mandianto. 2002. *Nelayan Nusantara*. Jakarta: Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosek Kelautan dan Perikanan Badan Riset Kelautan dan Perikanan.
- Sibagariang, et al. 2011. *Analisis Potensi Lestari Sumberdaya Perikanan Tuna Longline di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah*. Maspari Journal 03. Hal 24-29.
- Singarimbun, M dan Sofian Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta. 33hlm.
- Sipahelut M, 2010. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Tesis. Institut Pertanian Bogor
- Siswanto B, 2008. *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan*. Malang: Laksbang Mediatama. Hlm 193-216.
- Subagio, Amin. 2005. *Pengembangan Kelembagaan Pangan Masyarakat Dalam Pemantapan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah)*. Tesis. Bogor:IPB.
- Sudirman. 2007. *Peranan Iptek Dalam Pembangunan Sumberdaya Kelautan Secara Berkelanjutan*. Makalah disampaikan pada Kongres Ilmu Pengetahuan Wilayah Unhas Makasar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta.
- Suhana. 2008. *Analisis Ekonomi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Ikan Teluk Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Suharno. 2008. *Analisis Sumberdaya Udang Dengan Model Bioekonomi Pada Nelayan Trammel Net Di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah*.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta. Tesis S2 Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang (tidak dipublikasikan).
- Syahyuti, 2003. *Bedah Konsep Kelembagaan : Strategi Pengembangan dan Penerapannya Dalam Penelitian Pertanian*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Tribawono, Djoko. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Wahyudi, Dedi Putra. 2014. *Analisis Persepsi Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala Kecil di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

- Wahyuningsih dkk. 1977. *Budaya Kerja Nelayan Indonesia di Jawa Tengah*. Jakarta : Depdikbud Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini
- WCED. 1987. *Our Common Future. World Commission on Environment and Development*, Oxford University Press, Oxford.
- Wibowo, Ashri Prastiko. 2014. *Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Komoditas Ikan Bandeng di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati*. Skripsi : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Williamson Oliver, 2000. *The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead*. Journal of Economic Literature.
- Wilson, James Q. 1989. *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It*. US: BasicBooks Division of Harper Collins Publishers.
- Witri, Septanty Diah. 2011. *Kajian Produksi Hasil Tangkapan Didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi Sebagai Bahan Baku Industri Pengolahan*. Institut Pertanian Bogor.
- Yuli, Dody. 2011. *Peran Sektor Perikanan Dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis Input-Output*. Artikel : Program Pascasarjana Universitas Andalas.
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. *Ekonomi Kelembagaan : Definisi, Teori, dan Strategi*. Malang : Bayu Media Publishing.

**Perundang-undangan:**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. LN.RI tahun 2009 Nomor : 12, TLN.RI Nomor : 4967.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Kelautan dan Perikanan. Jakarta: Sekretariat Negara.